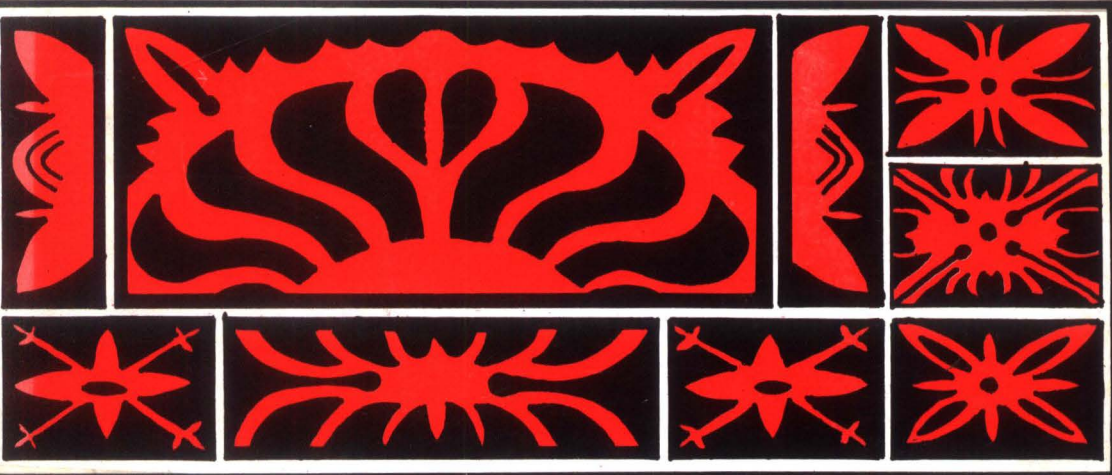




Milik Dep. DIKBUD.
Tidak diperdagangkan

**PERSEPSI TENTANG ETOS KERJA
KAITANNYA DENGAN NILAI KEBUDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN CIRACAS
KECAMATAN CIRACAS JAKARTA TIMUR
D.K.I. JAKARTA**



Direktorat
Kebudayaan
22

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Milik Dep. DIKBUD
Tidak Diperdagangkan

**PERSEPSI TENTANG ETOS KERJA KAITANNYA
DENGAN NILAI KEBUDAYAAN MASYARAKAT DI
KELURAHAN CIRACAS KECAMATAN CIRACAS
JAKARTA TIMUR D.K.I. JAKARTA**

TIM PENELITI/PENULIS :

- | | | |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| 1. DRS. ABD. NASHIR | : | Ketua Aspek |
| 2. ZAENAL MUTTAQIEN SH | : | Angota |

EDITOR :

Drs. H. AS. NASUTION

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BAGIAN PROYEK PENGKAJIAN DAN PEMBINAAN NILAI-NILAI BUDAYA
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 1995/1996

PRA KATA

Bagian proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya (P2NB) DKI Jakarta yang telah menggali dan mencetak naskah-naskah kebudayaan daerah DKI Jakarta demi nilai-nilai luhur budaya bangsa dalam rangka memperkuat penghayatan, dan pengamalan Pancasila demi tercapainya ketahanan Nasional di bidang sosial Budaya.

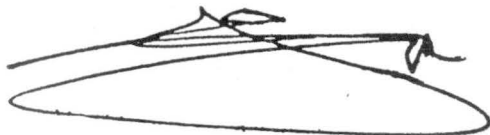
Pada tahun anggaran 1995/1996 Bagian proyek dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya DKI Jakarta mencetak naskah hasil penelitian tahun 1994/1995 yang berjudul :
"Persepsi tentang etos kerja kaitannya dengan nilai kebudayaan masyarakat di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur D.K.I. Jakarta",-

Dengan diterbitkannya buku ini, tak lupa kami mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan bimbingan Bapak Direktur Ditjarahmitra, Bapak Gubernur KDKI Jakarta beserta aparatnya, Bapak pemimpin Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-nilai Budaya pusat, Bapak Kepala Kanwil Depdikbud DKI Jakarta dan seluruh Tim peneliti serta semua pihak yang telah berperan serta sehingga berhasilnya penerbitan buku ini.

Sudah barang tentu buku ini masih terdapat beberapa kekurangan baik isi maupun penyajian, untuk itu saran yang bersifat membangun dari semua pihak sangat kami harapkan.

Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi kita semua.

Jakarta, Juli 1995
Pemimpin Bagian Proyek P2NB
DKI Jakarta,



Drs. H. HASAN MOCH. TOHA
NIP.130440460.

**KATA SAMBUTAN KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

1. Bahwa budaya bangsa merupakan kekayaan sekaligus merupakan jati diri bagi bangsa yang bersangkutan . Khasanah budaya bangsa Indonesia sedemikian tinggi , baik keluhurannya. merupakan kekayaan yang harus dipelihara , dilestarikan dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
2. Salah satu pendekatan untuk mewujudkan butir 1 diatas adalah menulis dan atau membukukannya untuk kemudian disebarakan.
3. Oleh karena itu saya hargai dan sambut baik kegiatan Bagian Proyek Pengkajian dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB) DKI Jakarta yang menerbitkan naskah yang menggambarkan , "Persepsi tentang etos kerja kaitannya dengan nilai Kebudayaan masyarakat di Kelurahan Ciracas Kecamatan Ciracas Jakarta Timur D.K.I. Jakarta", -.
4. Saya memahami bahwa materi dari naskah buku tersebut masih jauh dari pada lengkap dan sempurna. Oleh karena itu setiap upaya dari manapun datangnya dan bermaksud menyempurnakan, jelas akan disampaikan terima kasih dan penghargaan.
5. Akhirnya semoga penerbitan naskah ini mencapai tujuannya.

Jakarta, Medio Juli 1995



Drs. H. KUSNAN ISMUKANTO

NIP. 130119036

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| PRA KATA..... | iii |
| KATA SAMBUTAN | v |
| DAFTAR ISI | vii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1 Latar belakang..... | 1 |
| 1.2 Masalah..... | 3 |
| 1.3 Tujuan penelitian | 4 |
| 1.4 Ruang lingkup | 4 |
| 1.5 Metode Penelitian | 4 |
| 1.6 Sistematika Penulisan | 4 |
| BAB II BEBERAPA FAKTOR YANG MEMBENTUK/MEMPENGARUHI ETOS KERJA | 7 |
| 2.1. Pengertian etos kerja | 7 |
| 2.2. Faktor kesejarahan | 8 |
| 2.3. Faktor geografis | 10 |
| 2.4. Faktor jiwa perantau (emigrasi) | 12 |
| BAB III KEBERADAAN KETENAGA KERJAAN DI DKI JAKARTA | 15 |
| 3.1. Pegawai Negeri (Birokrasi) | 15 |
| 3.2. Pegawai Swasta | 20 |
| 3.3. Sektor Informal | 24 |
| BAB IV PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ETOS KERJA | 31 |
| 4.1. Pembangunan ekonomi pada saat ini | 32 |
| BAB V PENUTUP | 41 |
| 5.1. Kesimpulan | 42 |
| 5.2. Saran-saran | 43 |
| DAFTAR KEPUSTAKAAN | 45 |
| DAFTAR RESPONDEN | 48 |

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar belakang

Dunia ini dibangun di atas cucuran keringat kaum pekerja. Demikianlah keringat mereka telah membasahi semua lambang kemegahan peradaban. Sementara itu bila terjadi resesi atau kebangkrutan ekonomi, kaum pekerja juga yang harus menebusnya. Mereka "dilempar" keluar pabrik tak ubahnya seonggok sekrup yang tak lagi berguna. Pendeknya kaum pekerja telah menjadi lambang dari ironi besar. Mereka menciptakan kemakmuran, tetapi tak puas mengenyami mereka membangun peradaban yang megah, tetapi harus tinggal di sudut yang paling kelam (Aswab Mahasin, 1976: 2)

Kenyataan tersebut dapat dilihat pada proyek-proyek bangunan yang bertingkat tinggi, penggali saluran telepon, listrik, air minum, bahkan pembuat jalan yang beraspal hotmik dimana para pekerja tidak akan menikmati proyek-proyek tersebut.

Sementara para pegawai negeri pada umumnya mengurus pekerjaan setiap hari hingga sore hari. Ada yang mendapat pekerjaan banyak sekali, sementara yang lainnya hanya membaca koran, mondar-mandir (hilir-mudik) diruang belakang sambil memikirkan nasibnya yang belum berubah.

Sedangkan para karyawan swasta lebih tekunnya bekerja seperti tidak henti-hentinya, khususnya di pabrik-pabrik yang memberlakukan kerja 3 lapis (sistem shift). Mereka itu bagaikan mesin. Sementara karyawan lainnya yang bekerja di perkantoran, apalagi di gedung-gedung bertingkat berpenampilan rapi, membuat suasana tersebut seperti suasana yang ada di cerita film.

Yang membuat manusia itu menjadi manusia dan dapat dibedakan dengan hewan adalah kerja. Manusia mulai menghasilkan sarana-sarana untuk hidup. Oleh karena manusia menghasilkan sarana-sarana untuk hidupnya, maka manusia secara tidak langsung menghasilkan eksistensinya materialnya sendiri. Disinilah menghasilkan kebudayaan. Cara manusia menghasilkan sarana-sarana untuk hidupnya, pertama-tama tergantung dari sifat sarana-sarana hidup yang tersedia dan harus diperbanyak (L. Lacyendecker, 1983 : 245).

Bila dilihat dari perspektif sejarah, kemajuan bangsa Eropa (Barat) dimulai dari Revolusi Industri, khususnya waktu ditemukan mesin uap oleh James Watt sekitar abad XVIII (sekitar tahun 1769) di Inggris (J.B. Wahyudi, 1992: 2). Mesin uap ini dipasang pada lokomotif, kapal, mesin-mesin pabrik yang mempunyai dampak yang luas terhadap sistem transportasi darat dan laut, dan teknologi produksi industri (Mochtar Lubis, 1985: 1-2). Mesin uap juga dapat memassalkan produksi dibanding tenaga manusia, atau tenaga kincir angin maupun tenaga air.

Kemajuan masyarakat Eropa tidak terlepas dari masyarakat Islam (bangsa Arab) yang pernah menguasai Ilmu pengetahuan, khususnya pada masa Dinasti Umayyah yang berpusat di Andalusia (Spanyol, sekarang) dan Dinasti Abbassiyah (Irak, sekarang) pada tahun waktu Eropa masih "gelap". Para pujangga Islam menerjemahkan pengetahuan dari

bahasa Romawi, Yunani, Persia, Hindu ke dalam bahasa Arab. Oleh karena itu muncullah Universitas (Perguruan Tinggi) sebagai pusat ilmu pengetahuan; dan para pelajar dari Eropa banyak yang datang ke negeri-negeri Islam pada masa itu (A. Latif Osman, 1975: 56; Ian Roxborough, 1986: 9).

Akan tetapi menurut pandangan sosiolog kondang yaitu Max Weber, kemajuan bangsa Eropa dilandasi oleh etika protestan, aliran Calvin (Calvinisme). Menurut Calvin dan para pengikutnya-setelah mereka memutuskan diri dari gereja menegaskan bahwa yang terpenting adalah kesadaran individu dan penafsiran individu terhadap Bibel (Injil), dan menolak dalih bahwa hanya gereja saja yang berhak menafsirkan Bibel. Calvin memang menganggap manusia telah ditakdirkan, tapi hanya beberapa saja yakni-golongan terpilih yang akan masuk sorga. Tidak ada cara lain untuk mengetahui lebih dahulu apakah seseorang itu akan terpilih atau tidak. Doktrin teologis ini menurut Weber mengakibatkan kekhawatiran yang mendalam antar pengikut Calvin. Karena itu, untuk mengurangi kekhawatiran ini dan meyakinkan diri mereka bahwa mereka berusaha bertingkah laku seolah-olah benar-benar terpanggil. Ini berarti, pertama-tama melakukan pengaturan kehidupan sehari-hari secara sistematis, termasuk usaha-usaha ekonomi. Asketisme dan dorongan yang timbul karena kekhawatiran yang mendalam untuk menunjukkan lambang-lambang duniawi dari yang Rahmat Tuhan ini telah menyebabkan terjadinya akumulasi modal dan perkembangan ekonomi yang cepat (Ian Roxborough, *ibid*: 2-3). Dari semangat inilah atau etos kerja inilah menimbulkan Kapitalisme.

Lain halnya masyarakat Jepang yang mempunyai etos kerja tinggi seperti halnya masyarakat Eropa. Menurut Robert Bellah etos kerja masyarakat Jepang dilandasi oleh "agama Takugawa" yang mengandung elemen untuk mendorong munculnya sebuah ideologi yang pada waktu itu (Restorasi Meiji) sanggup mengadakan perubahan ekonomi yang besar, yang disponsori oleh pemerintahnya. Adalah kelas menengah Samurai yang terdiri dari pejabat aristokrat, dan bukannya para saudagar, yang merupakan pendukung dari semangat ekonomi baru (Bellah, 1992: 256-257).

Tulisan ini akan membahas tentang "Persepsi Etos Kerja; Kaitannya dengan nilai budaya masyarakat di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur".

Alasan pemilihan lokasi tersebut dijadikan sebagai daerah penelitian, pertama adalah bahwa Kelurahan Ciracas memenuhi syarat berdasarkan Turn of Refrence (TOR) yaitu daerah yang masih banyak penduduk aslinya (masyarakat Betawi). Kedua adalah Kelurahan Ciracas merupakan salah satu daerah industri untuk wilayah kotamadya Jakarta Timur setelah kawasan industri Pulo Gadung.

Kelurahan Ciracas merupakan salah satu dari lima kelurahan yang ada dalam wilayah Kecamatan Ciracas. Letak wilayah Kelurahan Ciracas ini di sebelah selatan dari Terminal bus luar Kota "Kampung Rambutan"

Adapun batas wilayah Kelurahan Ciracas secara geografis yang luasnya 393,30 Ha sebagai berikut :

| | | |
|-----------------|---|--|
| Sebelah Utara | : | Kelurahan Susukan dan Kelurahan Rambutan |
| Sebelah Selatan | : | Kelurahan Kelapa Dua Wetan dan Kelurahan Pekayon |

Sebelah Barat : Jalan Raya Bogor/Kelurahan Cijantung
Sebelah Timur : Jalan Tol Jagorawi/Kelurahan Cipayung.

Jumlah penduduk Kelurahan Ciracas berdasarkan Laporan Kelurahan Ciracas tahun 1993/1994 tercatat 34.055 jiwa, yang terdiri dari 17.196 laki-laki, dan 16.859 perempuan. Mereka tinggal dan menyebar di 10 Rukun Wilayah atau 144 Rukun Tetangga.

Adapun mata pencaharian penduduknya yang paling dominan adalah petani/pedagang sebanyak 3.230 orang. Sedangkan lainnya adalah buruh 2.624 orang, Pegawai Negeri Sipil 2.220 orang, ABRI 1.413 orang, dan lain-lain adalah 606 orang.

Mengenai tingkat pendidikan penduduknya, tidak termuat dalam laporan tahunan tersebut, yang termuat adalah sarana pendidikan yaitu mulai dari Taman Kanak-kanak (TK) sampai Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA). Jumlah Taman Kanak-kanak sebanyak 10 buah, SD 10 buah, SLTP Negeri 3 buah dan swasta 1 buah, SLTA Negeri 1 buah dan swasta juga 1 buah. Sedangkan sekolah (Islam) atau juga sering disebut Madrasah berjumlah 5 buah.

Pengertian Etos Kerja adalah sebagai pandangan hidup khas suatu golongan sosial dalam kegiatan melakukan sesuatu (Kamus Umum Bahasa Indonesia, 1988: 237-428). Etos, menurut Geertz adalah sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup. Etos merupakan aspek evaluatif yang bersifat menilai (Taufik Abdulah, 1982: 3).

Bagaimana etos kerja masyarakat di luar masyarakat Eropa, dan Jepang seperti halnya masyarakat Indonesia yang heterogen itu, ataupun masyarakat Jakarta yang merupakan Miniatur Indonesia. Ada anggapan bahwa masyarakat Indonesia etos kerjanya tidak sekeras masyarakat Eropa atau Jepang. Tuduhan semacam ini tidak seluruhnya benar. Karena beberapa peneliti seperti Geertz dalam mendiskripsikan masyarakat santri di Mojokuto maupun Tabanan di Bali justru mendukung bahwa etos kerja masyarakat tersebut cukup tinggi (Geertz, 1977). Begitu juga masyarakat Minang yang mempunyai jiwa merantau, mempunyai etos kerja yang tinggi.

Begitu juga halnya masyarakat perantau yang ada di Jakarta, etos kerjanya tinggi. Hal ini disebabkan sudah menjadi panggilan nurani manusia. Artinya bahwa manusia yang dirantau orang harus kerja keras. Karena bila tidak kerja keras, pasti akan menjadi sampah masyarakat, seperti menjadi penjahat, gelandangan, pengemis, dsb.

Sedangkan masyarakat Betawi menurut sinyalemen sementara orang etos kerjanya kurang ulet, keras, dibandingkan para pendatang (perantau) tidak semuanya benar. Karena dalam penelitian ini ditemukan mereka itu ada yang bekerja di sektor industri, pegawai negeri, bahkan ada di sektor informal, seperti supir, tukang "ojeg", pedagang, dsb.

1.2. Masalah

Dalam GBHN 1993 diisyaratkan bahwa salah satu tujuan dan sasaran Pembangunan Lima Tahun Keenam adalah menumbuhkan sikap kemandirian dalam diri manusia dan masyarakat Indonesia melalui peningkatan peran serta, efisiensi dan produktifitas rakyat dalam rangka meningkatkan taraf hidup, kecerdasan dan kesejahteraan lahir batin.

Untuk menumbuhkan "sikap yang mandiri" itu ditentukan kualitas sumber daya manusia yang dapat dipertanggung jawabkan dalam bidang ketenaga kerjaan. Dengan sumber daya yang berkualitas itu, diasumsikan akan tercipta etos kerja setiap individu yang langsung maupun tidak langsung terlibat dalam pembangunan.

Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah seberapa jauh etos kerja masyarakat di DKI Jakarta dan khususnya di Wilayah Kelurahan Ciracas dalam mendukung keberhasilan pembangunan bila dikaitkan dengan sistem nilai budaya yang berlaku.

1.3. Tujuan Penelitian

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk menggali sistem budaya masyarakat di Indonesia yang berpengaruh pada sikap dan mentalitas pendukung suatu kebudayaan. Umumnya masyarakat Betawi banyak dipengaruhi oleh sistem nilai budaya Islam. Dengan demikian kebanyakan masyarakat Betawi yang merupakan penduduk asli Jakarta dalam mata pencahariannya adalah berdagang. Hal itu sejalan dengan metode penyebaran agama Islam di Indonesia melalui jalur perdagangan. Hanya sejak jaman Orde Baru, masyarakat Betawi mulai bergeser mata pencahariannya, seperti menjadi pegawai negeri, karyawan swasta, sektor informal dan sebagainya.

1.4. Ruang Lingkup

Penelitian "Persepsi Tentang Etos Kerja : Kaitannya dengan budaya masyarakat di Kelurahan Ciracas" ini dibatasi pada lingkup persepsi masyarakat Khususnya sasaran pada pegawai negeri, termasuk guru, karyawan swasta, dan juga sektor informal.

1.5. Metode Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Teknik yang digunakan dalam menjangkau data dilakukan melalui wawancara secara mendalam (deep interview) terhadap beberapa tokoh masyarakat yang dianggap mengetahui perusahaan tersebut. Data kuantitatif diperoleh melalui wawancara berstruktur. Wawancara berstruktur menggunakan daftar pertanyaan (interview schedule) dilakukan terhadap sejumlah responden yang dipilih secara acak (random sampling). Untuk melengkapi data dan informasi yang berkenaan dengan tema penelitian ini, kami juga melakukan wawancara sambil lalu. Disamping itu pula kami menggunakan studi kepustakaan untuk melengkapi data-data yang diperoleh dari wawancara dan juga menggunakan teknik pengamatan (observasi).

1.6. Sistematika Penulisan

Secara garis besar isi naskah ini dibagi menjadi lima bab.

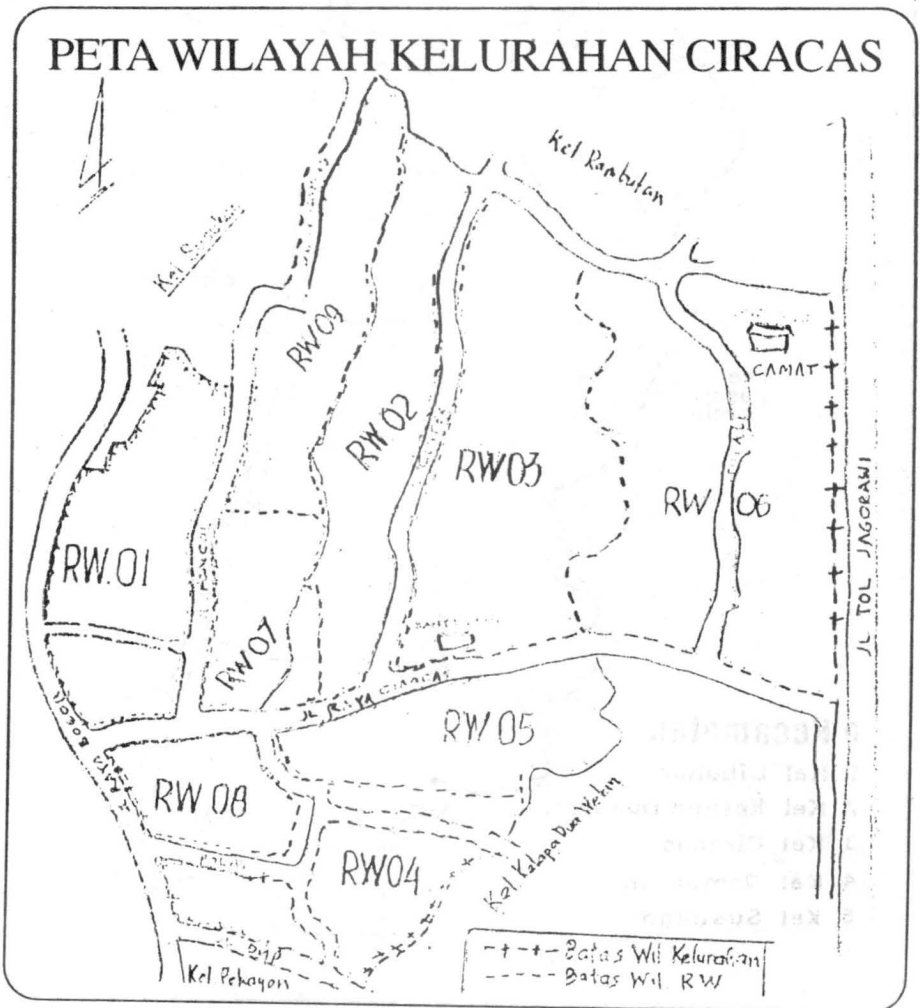
Bab I Pendahuluan memuat latar belakang, masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup, metode, dan sistematika penulisan.

Bab II berisi tentang beberapa faktor yang membentuk/mempengaruhi etos kerja, pengertian etos kerja, faktor kesejarahan, faktor geografis, dan faktor jiwa perantau (emigrasi).

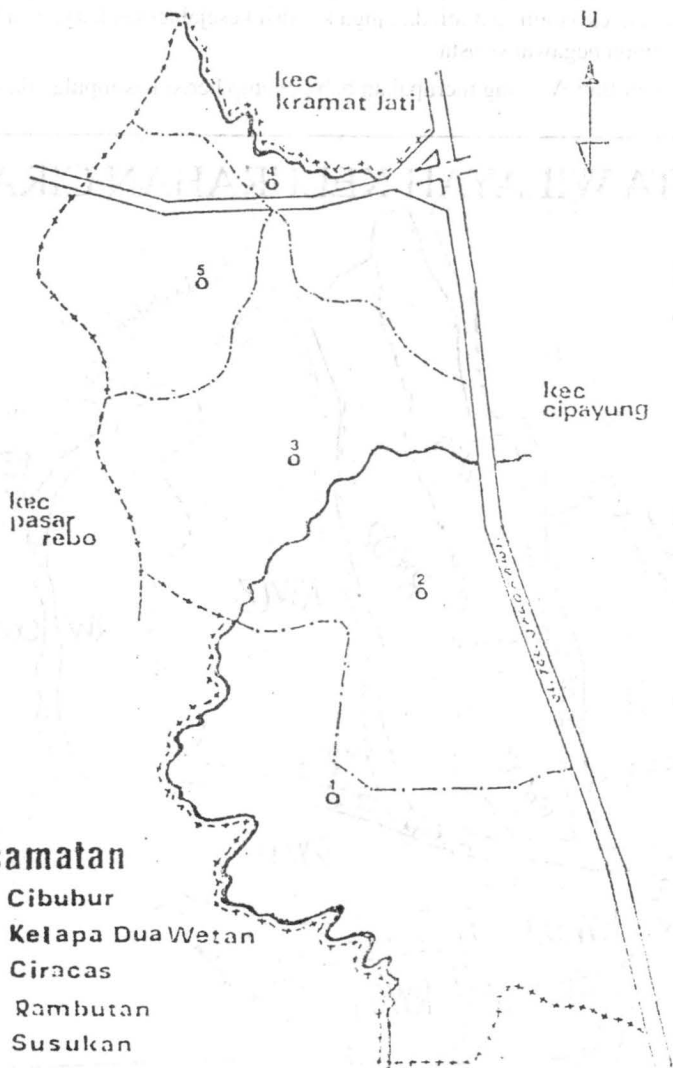
Bab III memuat keberadaan tenaga kerja di DKI Jakarta, seperti Pegawai Negeri (Birokrasi), Pegawai Swasta, dan juga tenaga kerja di sektor informal.

Bab IV memuat tentang Pembangunan Ekonomi dan etos kerja yang meliputi pembangunan ekonomi saat ini, dan juga kondisi kesejahteraan karyawan baik pegawai negeri, maupun pegawai swasta.

Adapun Bab V yang merupakan bab penutup berisi kesimpulan dan saran-saran.



KECAMATAN CIRACAS



o Kecamatan

1. Kel Cibubur
2. Kel Kelapa Dua Wetan
3. Kel Ciracas
4. Kel Rambutan
5. Kel Susukan

BAB II

BEBERAPA FAKTOR YANG MEMPENGARUHI ETOS KERJA

2.1. Pengertian Etos Kerja

Etos kerja berasal dari dua kata yaitu etos dan kerja. Etos berasal dari kata Yunani *ethos*. Menurut salah satu kamus Inggris-Indonesia, *ethos* berarti jiwa khas suatu bangsa (John M. Echols dan Hasan Shadily :1983:219). Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, *ethos* bermakna pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial (1988: 237). Sedangkan kata "kerja" diartikan sebagai kegiatan melakukan sesuatu (1988:428). Dengan demikian etos kerja adalah sebagai jiwa hidup suatu bangsa atau pandangan hidup yang khas suatu golongan sosial dalam kegiatan melakukan sesuatu.

Pengkajian tentang etos kerja pada dasarnya dikaitkan dengan kemajuan suatu bangsa yaitu menjadi bangsa yang modern atau masyarakat industrialis. Bahasa sederhananya adalah bahwa majunya masyarakat Eropa (Barat) dan Jepang ditunjang oleh etos kerja tinggi. Dalam hal ini Geertz melihat bahwa etos kerja merupakan sikap yang mendasar terhadap diri dan dunia yang dipancarkan hidup (Taufik Abdullah, 1982: 3).

Max Weber melihat kemajuan bangsa Eropa dilandasi oleh semangat etika protestan aliran Calvinisme. Menurut Calvin dan para pengikutnya setelah mereka memutuskan dari gereja katolik-menegaskan bahwa yang penting adalah kesadaran individu dan penafsiran individu terhadap Bibel (Injil), dan menolak dalih bahwa hanya gereja saja yang berhak menafsirkan Bibel. Calvin memang menganggap manusia telah ditakdirkan, tetapi hanya beberapa saja yakni golongan terpilih yang akan memasuki sorga. Tidak ada cara lain untuk mengetahui lebih dahulu apakah seseorang itu terpilih atau tidak. Doktrin teologis ini menurut Weber mengakibatkan kekhawatiran yang mendalam para pengikut Calvin. Karena itu untuk mengurangi kekhawatiran ini dan meyakinkan diri mereka bahwa mereka benar-benar termasuk golongan terpilih, mereka berusaha bertingkah laku seolah-olah benar-benar terpanggil. Ini berarti, pertama-tama melakukan pengaturan kehidupan sehari-hari secara sistematis, termasuk usaha-usaha ekonomi, untuk mencegah setiap jenis kemalasan atau kesembronoan. Askestisme dan dorongan yang timbul karena kekhawatiran yang mendalam lambang-lambang duniawi dari rahmat Tuhan ini, telah menyebabkan terjadinya akumulasi modal dan perkembangan ekonomi yang cepat (Ian Roxborough, 1986: 2-3).

Tesis Weber itu menjengkelkan peneliti katolik terkemuka yaitu Lengki, sebagaimana dikutip oleh Taufik Abdulah (1982:16). Alasannya adalah bahwa penelitian Weber fokusnya bahwa di Jerman yang sebagian besar para pemimpin perusahaan, pemilik modal, dan personil teknis dan komersial tingkat atas adalah orang-orang protestan, bukannya katolik. menurut penelitian Katolik itu bahwa masalah "etika Protestan" itu sudah wktunya memperoleh "moratorium", istirahat.

Lain halnya Robert N. Bellah melihat kemajuan bangsa Jepang didukung oleh

etika samurai yang berdasarkan dalam "religi" Tokugawa. Adalah kelas samurai yang dapat menimbulkan perubahan ekonomi yang besar yang disponsori oleh pemerintah masa Meiji Tokugawa. Dalam menggambarkan etika Samurai, Bellah menguraikan tentang aturan rumah Samurai Iwasaki : pendiri Mitsubishi yaitu :

1. Jangan disibukkan oleh urusan-urusan kecil, tetapi arahkanlah wawasan kepada manajemen perusahaan besar.
2. Sekali kamu memulai suatu usaha pastikan kamu berhasil.
3. Jangan melibatkan diri dalam usaha-usaha spekulatif.
4. Jalankan semua usaha dengan berpedoman pada kepentingan nasional.
5. Jangan pernah melupakan semangat murni dan *makoto*.
6. Jadilah pekerja keras yang ngahari dan yang selalu mempertimbangkan kepentingan orang lain.
7. Pakailah pegawai yang tepat.
8. Perlakukanlah pegawaimu dengan baik.
9. Bersikaplah berani dalam memulai usaha tapi teliti dan hati-hatilah dalam melaksanakannya (Robert Bellah : 1992: 256-257).

Inti etos kerja masyarakat Jepang adalah mengabdikan kepada raja (Kaisar). Jika seseorang ayah menentang raja, anak yang tahu kewajibannya akan meninggalkan orang tuanya dan mengikuti raja. Inilah ketaatan kepada orang tua dalam bentuknya yang tertinggi (Robert N. Bellah, *ibid* : 113)

Seorang psikolog mengemukakan bahwa mereka atau kelompok sosial tertentu, kelompok keagamaan tertentu itu sudah terjangkit oleh "virus" yang disebut n Ach (need for Achievement, kebutuhan untuk meraih hasil atau prestasi) yang merupakan dasar dari etos kerja : dan ini menghasilkan bahwa derajat mereka lebih tinggi dari orang-orang lain yang ada disekitar mereka, dan bahwa dengan suatu cara tertentu, merekalah yang memegang kunci keselamatan yang mungkin bukan saja untuk mereka sendiri, tetapi juga bagi orang lain (David C. McClelland, *tt* : 12).

Menurut Mc Clelland, agar supaya etos kerja masyarakat itu menjadi tinggi, hendaknya ditanamkan perasaan minoritas yang ketat, dan juga doktrin agar mereka dapat menganggap dirinya lebih unggul dari yang lain. Sehingga meningkatkan n Achnya. Jika tidak demikian, maka alternatif lainnya melalui proses penanaman ilmu pengetahuan (proses pendidikan) atau pelatihan. Dengan pendidikan tersebut, dapat membentuk diri menjadi produktif dan inovatif. Ilmu pengetahuan sekurang-kurangnya telah menjadikan informasi-informasi yang diperlukan orang-orang yang secara sadar ingin menambah daya dorong kearah modernisasi.

2.2. Faktor Kesejarahan

Kalau kita memperhatikan ajaran agama (Islam khususnya) maka dalam kitab suci Al-Qur'an (surat Albaqaroh ayat 30) dikatakan bahwa manusia pertama berasal dari

Adam. Ini berarti pada dasarnya manusia itu sama. Manusia di dunia ini berasal dari satu keturunan yang akhirnya berkembang dan berkelana ke daerah-daerah yang masih kosong, lambat laun akhirnya manusia itu berinteraksi satu sama lain dan membentuk satu komunitas dan menjadi satu masyarakat.

Pada masa purbakala, ketika manusia hanya dapat memenuhi kebutuhan hidup yang pokoknya saja, seperti pangan, ketika itu kemakmuran masih sangat rendah.

Kemakmuran itu kemudian bertambah maju, di daerah yang satu lebih cepat dari pada di daerah yang lain. Adakalanya pula kemakmuran itu merosot dengan sangat dan baru berabad-abad kemudian dapat pulih kembali.

Dilihat dari sistem ekonominya, (mata pencaharian) maka masyarakat yang paling tua adalah masyarakat yang sistem ekonominya bermata pencarian berburu dan meramu (*hunting and gathering*). Masyarakat semacam itu masih terdapat di pulau Irian Jaya, yaitu masyarakat yang hidup di daerah rawa-rawa di pantai Irian Jaya (Koentjaraningrat, 1986 : 359).

Tingkat mata pencarian berikutnya adalah pertanian, seperti masyarakat yang tinggal di lembah-lebah sungai Nil (Mesir), Euphrat dan Tigris (Irak). Di daerah tersebut tumbuh peradaban yang tinggi seperti kerajaan Fir'aun dan Babylonia (Wasseling dan K. YFF, 1959 : 9). Bangsa lainnya yang sistem ekonominya dari sistem pertanian adalah bangsa Yunani dan Romawi (Eropa).

Dalam masyarakat jaman pertengahan, pertanian merupakan mata pencarian yang pokok. Sampai abad ke 12 kira-kira penduduk Eropa Barat dan Eropa Selatan bekerja di sektor pertanian (Laeyendecker, 1983 : 3), kehidupan ekonomi diorganisir sekitar tanah kekuasaan (dominan) para penguasa tanah feodal (Lord) yang berkuasa atas kaum tani beserta keluarga mereka yang merupakan bagian dari tanah itu.

Di Jawa sebelum masa penjajahan, kehidupan masyarakatnya juga disektor pertanian. Menurut tradisi mutlak raja adalah satu-satunya pemilik tanah dalam arti secara teoritisnya berkuasa atas tanah tersebut. Dan yang mengerjakan atau menggarapnya adalah para petani (cacah) oleh karena para priyayi (abdi dalem) tidak mendapatkan gaji maka mereka diberi *lumbuh*, yaitu tanah gaji yang tidak pernah disebut menurut luasnya dalam hektar atau acre, tetapi menurut jumlah penduduknya (Ongkokhoh, 1984 : 5).

Dari gambar tersebut bahwa masa fodalisme itu terjadi eksploitasi antara tuan tanah terhadap para petani. Akumulasi modal oleh para bangsawan bukan didasarkan pada semangat kerja sebagaimana yang di teorikan oleh Weber dengan etika protestan, tetapi oleh adanya eksploitasi, perampasan, upeti dari seberang, laba monopoli, pencaplokan (Roxborough : 1986 : 7).

Inipun didukung oleh fakta kejatuhan Kota Konstantinopal pada tahun 1453 ke tangan kerajaan Turki Yunani. Konstantinopal merupakan benteng terakhir dari kerajaan Romawi Timur yang merupakan pusat peradaban Romawi (A. Latif Qosman, 1975 : 146). Artinya bahwa para ilmuwan dari Yunani banyak hijrah ke Eropa Barat. Para ilmuwan tersebut mengajar di sekolah-sekolah tinggi maupun sekolah-sekolah menengah di Eropa.

Dengan adanya rasa takut bangsa Eropa terhadap kerajaan Turki (Islam), mereka berusaha mencari peluang, dan terobosan untuk mencari penghidupan yang baru. Bangsa Eropa mencari jalan baru yang dahulunya untuk berdagang hanya disekitar laut Tengah, akhirnya mereka mengarungi lautan melewati lautan Atlantik sebelah barat benua Afrika menuju ke samudera Hindia untuk mencari mata dagangan rempah-rempah di kepulauan Indonesia. Khususnya di Maluku (Banda). Orang Eropa yang sampai di kepulauan Indonesia pertama kali adalah bangsa Portugis (Willarard A. Hauna, 1983 : 5).

Ada tiga faktor utama yang menyebabkan runtuhnya Feodalisme; pertama pertentangan antara Land Lord (tuan tanah bangsawan) dengan petani mengenai tanah dan tenaga kerja; kedua tumbuhnya kota; dan ketiga tumbuhnya negara absolut yang tersentralisasi sebagai pengganti kehidupan politik feodal yang terdesentralisasi (Roxborough : op cit : 10).

Hasil dari jaman feodalisme ini yaitu akumulasi modal oleh para bangsawan (tuan tanah) terhadap para petani penggarap dan adanya kolonialisme yaitu perampasan kekayaan terhadap negara-negara jajahan (wilayah feriferal), menyebabkan masyarakat (negara) Eropa lebih unggul dari bangsa-bangsa di luar Eropa seperti bangsa-bangsa di Afrika maupun Asia, selain bangsa Jepang. Dan akhirnya negara-negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Perancis menjadi negara-negara kapitalis.

2.3. Faktor Geografis

Daerah-daerah yang tidak memungkinkan seseorang atau sebageaian masyarakat dapat hidup lebih baik akan ditinggalkannya daerah tersebut. Biasanya daerah yang ekonominya kurang mendukung, menyebabkan masyarakatnya pergi ke tempat-tempat yang memungkinkan penghidupannya lebih baik.

Hal ini berlaku pada bangsa Jerman pada abad pertengahan. Karena desakan ekonomi, bangsa Jerman datang berduyun-duyun bekerja di ladang-ladang orang Romawi (Italia). Begitu pula para pedagang dari negara Romawi Barat, pindah ke kota Konstatinopal (Istanbul). Kota Konstatinopal ini letaknya sangat baik dan merupakan kota yang terbesar, terindah, terkaya di seluruh Eropa selama abad pertengahan (Wasselink dan K. YFF, op. cit, 15)

Akibat lebih jauh dari kemiskinan yang ada di daerah, menyebabkan terjadinya arus urbanisasi. Proses urbanisasi ini disebabkan daya tarik ekonomi dari suatu kota. Ataupun seseorang akan meninggalkan tanah airnya mencari lapangan kerja di negara lain disebabkan upah di negara tujuan lebih tinggi dari pada di negara sendiri (J.H. De Goode, 1981 : 262).

Biasanya, para perantau itu etos kerjanya lebih tinggi dari pada penduduk aslinya. Hal ini disebabkan oleh adanya semangat untuk mempertahankan hidup (Survive) dan juga keinginan kekayaan tersebut untuk dibawa pulang ke kampungnya.

Begitu pula halnya di Eropa (khususnya Inggris), para warga desa berpindah ke kota. Karena di kota banyak sumber penghidupan (pabrik) akibat dari revolusi industri.

Para warga desa tidak dapat mengerjakan kerajinan rumah lagi karena adanya revolusi agraria. Akibatnya adalah timbullah penawaran tenaga kerja yang sangat besar, sehingga tingkat upah merosot (Wasselink dan K.YFF, op. cit : 98).

Meskipun upah itu dinaikkan oleh pihak pabrik kepada pihak buruh, pasti sebagian upah itu tidak akan diinvestasikan seperti hal para Kapitalis; melainkan upah yang tinggi tersebut akan dikonsumsi (Dudley Dillard, 1987 : 20). Artinya kemakmuran yang dimiliki oleh pihak buruh, tidak akan menjadikan mereka sebagai Kapitalis, tetapi tetap saja mereka akan mewarisi akumulasi modal lebih sedikit. Inipun seandainya pihak buruh yang mempunyai modal sedikit akan terjun ke dunia usaha, pasti pemodal kecil ini akan tertekan oleh modal yang kuat. Karena dengan modal yang kuat suatu produksi dapat dipasarkan, dan biaya produksi dapat ditekan. Sehingga pemasarannya tetap saja berjalan lancar. Sedangkan pemodal kecil tidak mungkin dapat bersaing dengan pemodal besar. Apabila jaringan pemodal kuat sudah begitu kuatnya mulai dari bahan baku, presesing sampai ke pemasaran.

Faktor Geografi khususnya, kelangkaan bahan baku suatu industri di negara Eropa maupun Jepang pada masa lahirnya Kapitalisme, menyebabkan negara-negara tersebut bersemangat tinggi mencari jajahan sebagai daerah bahan baku industri dan sekaligus daerah pemasaran. Oleh sebab itu tidaklah salah yang dikatakan Lenin, bahwa Imperialisme adalah bentuk perkembangan tertinggi dari Kapitalis (Arief Budiman, 1984 : XII).

Kalau kita melihat perkembangan sejarah "bangsa Indonesia" sebelum datangnya kolonialisme Eropa, etos kerja bangsa Indonesia sama seperti masyarakat Eropa. Etos kerja bangsa Indonesia terutama di sektor perdagangan mulai abad VII sampai datangnya Kolonial Eropa yaitu abad XVI/XVII. Sebagaimana telah diketahui bahwa wilayah Indonesia sudah terlibat dalam perdagangan internasional, seperti komoditi rempah-rempah (Djoko Suryo, 1986 : 26-27).

Akibat perdagangan yang meningkat pesat, terutama abad XVI, menyebabkan tumbuhnya kota-kota Pelabuhan perdagangan Aceh, Jambi, Palembang, Banten, Demak, Gresik, Makasar, Ternate, Tidore, Kelompok atau golongan yang terlibat di bidang perdagangan ini adalah kaum aristokrat dan golongan pedagang (ibid).

Sebagai golongan wiraswasta yang bergerak di bidang perdagangan ini dilandasi oleh prinsip Kapitalis seperti di Eropa yaitu motivasi untuk mengejar keuntungan dengan melalui penanaman modal baik berupa uang maupun barang (Burger, 1960 : 24). Bedanya antara pedagang Indonesia dengan Eropa adalah bahwa orang Eropa (Belanda) mengorganisir modal ke dalam perkumpulan VOC (Vereenigde Oost Indische Compagnie). Segangkan para pedagang Indonesia tidak mengorganisir modal di samping masih kuatnya ikatan "feodal", sehingga para pedagang tidak bebas dan tidak memiliki peranan penting dalam pemerintah kota seperti halnya kaum pedagang di Eropa pada masa itu (Djoko Suryo, op. cit : 28).

Kegiatan perdagangan dan pelayaran di Indonesia (nusantara) mengalami kemerosotan setelah kehadiran kapital dan teknik Barat khususnya VOC. Dengan

kelebihan dan kekuatan maupun organisasinya. VOC merebut dominasi dan monopoli dagang yang semula dipegang dan merupakan sistem dagang yang dikuasai oleh golongan wiraswasta Indonesia. Pengambilan alihan kekuasaan monopoli dan dominasi perdagangan di pusat-pusat perdagangan di Indonesia ditempuh dengan berbagai cara damai maupun melalui kekerasan. Akibatnya cukup fatal, yaitu bahwa perdagangan bangsa Indonesia hancur dan mati dalam periode akhir abad XVII. Sejak itu ketrampilan usaha bahari dan maritim banyak ditinggalkan (Djoko Suryo, *ibid*:29).

2.4. Faktor Jiwa perantau (emigrasi)

Kalau diperhatikan masyarakat Jakarta yang beraneka ragam dilihat dari etnisnya, maka penduduk asli Jakarta yaitu masyarakat Betawi, nampaknya semakin terdesak dan tersisih dari kehidupan ekonomi, politik, dsb. Secara empiris dan faktual dapat dilihat rumah-rumah mewah, kendaraan-kendaraan yang hilir mudik, kebanyakan dimiliki oleh masyarakat bukan Betawi. Begitu pula toko-toko yang ada di pusat-pusat perbelanjaan, kebanyakan pemilikinya masyarakat luar Betawi. Dan juga para pejabat di lingkungan Pemerintah hampir seluruhnya dipegang oleh masyarakat luar Betawi.

Kenyataan tersebut dapat diperjelas lagi yaitu bahwa masyarakat bukan pribumi yang ada di Jakarta, seperti masyarakat Cina, hampir seluruhnya menguasai urat nadi perekonomian. Hampir seluruhnya pasar yang besar maupun yang kecil, sudah dikuasai oleh para pedagang masyarakat keturunan Cina. Bahkan perekonomian nasional dan konglomerat hampir seluruhnya dikuasai oleh etnis Cina.

Di Malaysia pun kenyataannya bahwa penduduk asli Malaysia yaitu suku Malayu, secara ekonomis terdesak oleh penduduk pendatang yang berasal dari India dan Cina (S. Husein Alatas, 1982:152). Menurut sosiolog tersebut, bukan faktor agama yang menyebabkan para perantau tersebut menguasai jalur ekonomi, akan tetapi jiwa emigrasi tersebut yang menyebabkan kerja keras sehingga para perantau itu dapat menguasai jalur-jalur ekonomi.

Masalah perantau ini dikaitkan dengan usaha mencari pekerjaan yang sesuai dengan pendidikan jasa adanya daya tarik ekonomi (J.H. De Goede, 1981: 266: Kartini Sjahrir, 1989: 47). Umumnya para perantau yang berasal dari daerah pedesaan pergi ke kota besar. Mereka menganggap di kota tersedia lapangan pekerjaan, meskipun sesampainya di kota mereka tidak mendapatkan pekerjaan yang diharapkan, akan tetapi mau tidak mau mereka harus bekerja apa saja.

Gejala emigrasi atau urbanisasi masyarakat dari daerah menuju Jakarta khususnya, setiap tahun terus berjalan. Apabila Idul Fitri (lebaran), banyak sekali pendatang-pendatang baru yang memasuki kota Jakarta. Ini dapat dilihat di terminal bus, kereta api. Meskipun Jakarta semenjak Gubernur DKI Jakarta dijabat oleh Ali Sadikin, kota Jakarta dinyatakan sebagai kota tertutup bagi pendatang baru, akan tetapi masyarakat daerah, tetap saja "menyerbu" kota Jakarta.

Para perantau yang datang ke kota Jakarta bermacam-macam tingkat

pendidikannya; mulai dari tidak tamat sekolah dasar sampai perguruan tinggi. Bila seseorang mempunyai nasib yang baik atau mempunyai koneksi, biasanya mendapatkan pekerjaan lebih cepat. Ada yang bekerja di lembaga pemerintahan, perusahaan swasta. Sebaliknya jika nasib belum mujur, calon pekerja tersebut biasanya terjun ke sektor informal; seperti menjadi tukang sayur, penjaja koran, pembantu rumah tangga, pemulung dsb. Sektor informal disini diartikan sebagai bidang produksi barang dan jasa tertentu, yang terhindar dari pengawasan negara dan pantauan statistik pemerintah (Hans-Dieter Ebers, 1991 : 24).

Akan tetapi sektor informal di kota seringkali diperlakukan sebagai "sampah" sehingga dipandang oleh aparat pemerintah daerah harus dibersihkan. Justru sektor informal ini yang telah menyelamatkan kehidupan masyarakat yang miskin dipertanian. Bahkan sektor informal ini sebagai "bemper" yang dapat menampung tenaga kerja murah (Miftah Wirahadikusuma, 1991:33 : Paulus Widiyanto, 1991 : 2).

Oleh karena jumlah lapangan kerja yang tersedia dengan pencari kerja tidak seimbang, maka masyarakat Indonesia banyak mencari kerja di luar negeri. Umumnya negara yang dituju adalah negar Timur tengah, seperti Arab Saudi, sebagai pembantu rumah tangga; juga negara tetangga seperti Malaysia sebagai buruh bangunan atau bekerja di perkebunan-perkebunan.

Para perantau Indonesia yang ingin bekerja di luar negeri banyak yang berhasil membawa uang ke kampung halamannya. Uang tersebut biasanya dibelikan sawah atau untuk modal usaha. Ada juga yang gagal dalam merantau, seperti dianiaya oleh induk semangnya, seperti banyak diberitakan di media massa.

Meskipun banyak berita yang tidak mengenakkan tentang bekerja di luar negeri, terutama buruh yang tidak trampil, masih saja para pencari kerja tetap "nekad" untuk bekerja, demi mengejar upah yang lebih besar dibanding upah didalam negeri.

Begitu pula halnya para perantau dari daerah yang datang ke kota Jakarta, banyak yang berhasil dan banyak pula yang belum berhasil. Sehingga kaum urban tersebut menjadi beban pemerintah daerah Jakarta dalam hal penyediaan sarana tempat tinggal, kesehatan. Dan mereka yang belum berhasil itu, tinggal di daerah kumuh. Disinilah semangat kerja para perantau yang tidak kenal menyerah dalam menaklukkan keadaan yang bagaimanapun beratnya. Sebab, bila para perantau itu menyerah dengan nasib, niscaya dia akan hancur. Dan itulah yang harus dihadapinya.

Urbanisasi ke Jakarta akan terus berkembang pada masa yang akan datang karena hidup dipedesaan Jawa Barat, Tengah, Timur dan Yogya tidak cukup membuka lapangan pekerjaan. Masalah tanah pertanian yang semakin berkurang dan kesuburan tanah semakin gersang mengakibatkan produksi pertanian tidak cukup lagi bagi kebutuhan hidup petani. Malahan petani di Jawa tidak memiliki tanah sendiri. Mereka hanya petani penggarap. Tanah pertanian telah dimiliki petani berdasi dari kota-kota besar.

Kesenjangan ini memaksa petani berbondong-bondong pergi ke kota biarpun mereka tidak mempunyai bekal pendidikan, keterampilan atau modal.

BAB III

KEBERADAAN KETENAGAKERJAAN DI INDONESIA

Kalau diperhatikan surat kartu Tanda Penduduk (KTP), disitu tertera nama, jenis kelamin, tempat/tanggal lahir, status perkawinan, pekerjaan, alamat serta nama kelurahan dan kecamatan. Pekerjaan seseorang atau masyarakat beraneka ragam, mulai dari pegawai negeri sipil, ABRI, pegawai swasta (karyawan), petani, pedagang, wiraswasta, mahasiswa, pelajar, bahkan ibu rumah tangga.

Kerja adalah suatu sumber kepuasan manusia paling mendasar, merupakan katalis sosial, pelengkap status dan martabat yang terbaik bagi manusia (Menteri Tenaga Kerja, 1983:6). Jika seseorang tidak mempunyai suatu pekerjaan, maka masyarakat di sekelilingnya akan melecehkannya bahkan yang lebih tragis akan mencurigainya, terutama apabila di dalam suatu kelompok masyarakat terjadi kehilangan barang atau terjadi pencurian dan sebagainya.

Dalam tulisan ini akan difokuskan hanya kepada pekerjaan yang sifatnya formal seperti pegawai negeri, guru, dan karyawan swasta. Hal ini disebabkan padanya ketentuan dari pihak penyandang dana yaitu proyek pengkajian dan pembinaan Nilai-Nilai Budaya (P2NB). Bukan berarti jenis pekerjaan lainnya seperti petani, pedagang dan lainnya tidak penting. Bahkan selain pegawai negeri maupun swasta, pekerjaan lainnya justru sangat besar di dalam kehidupan bernegara maupun masyarakat. Apabila kalau dilihat secara empiris, penyerapan tenaga kerja di sektor pemerintahan dan perusahaan swasta lebih sedikit dibandingkan sektor informal seperti pedagang kecil khususnya. Meskipun sektor pekerjaan lainnya tidak dimasukkan dalam TOR tersebut, penulis akan tetap memasukkannya, dengan alasan seluruh pekerjaan masyarakat Indonesia merupakan kontribusi dalam mengisi pembangunan (kemerdekaan).

3.1. Pegawai negeri (Birokrasi).

Pegawai negeri atau birokrasi adalah orang yang digaji yang berfungsi didalam pemerintahan (Lace Castles, 1983:14). Birokrasi atau pegawai negeri terdiri dari pegawai negeri sipil dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI).

Birokrasi Indonesia merupakan warisan Kolonial Hindia Belanda. Sedangkan sebelum datangnya Kolonial Belanda Ke Indonesia Belum ada suatu kerajaan tradisional yang benar-benar menguasai seluruh wilayah Indonesia seperti sekarang ini.

Bila dilihat sejarah birokrasi di Indonesia menurut konsep modern yaitu dengan sistem penggajian, perpajakan, dan keuangan yang terpusat, maka birokrasi di Indonesia dimulai Jaman H.W. Dandels yang berkuasa tahun 1808-1811 (Schrieke, 1974:71; Onghokhom, 1984:27). Sebab sebelum kedatangan Daendels, para bupati tidak mendapat gaji dari "Pemerintah" VOC ataupun kerajaan tradisional. Para bupati menggantungkan hidup bukan dari gaji, melainkan dari tanah yang dikerjakan oleh para penduduk yang berada di bawah kekuasaannya (lungguh). Bila seorang bupati meninggal

atau dipeccat, maka lunggunnya (tanah gaji) akan dikembalikan kepada raja (Onghokhom, 1984:5)

Dalam menggaji pegawai, Pemerintah Daendels memperoleh dana dari penjualan tanah kepada pihak swasta. Tanah yang dijual kepada swasta adalah tanah di Basuki, Probolinggo (Jawa Timur). Penjualan tanah tersebut disebabkan Kas negara Kosong (R. Susanto, 1980:79, Onghokhom, Loc.Cit: 29) Encyclopaedia Van Nederlandsch Indie, 1919 : 345).

Begitu juga halnya T.S. Raffles (1811-1816) dalam mengisi kas negara menjual tanah kepada pihak swasta. Dan untuk menambah kas negara, Raffles memperkenalkan elemen baru dari negara modern yaitu sistem perpajakan (Onghokhom, ibid:29). Pajak tersebut diambil dari sewa tanah yang dikerjakan oleh para petani. Dengan adanya sistem pajak ini, pengawasan lebih ketat dan kerjasama lebih erat terhadap para pegawai (pangreh-praja) sampai ke desa-desa.

Ketika Indonesia (Jawa) dikembalikan ketangan Belanda oleh Inggris, maka penguasa Hindia Belanda yang dipimpin oleh Van Der Capellen (1818-1826), meneruskan kebijakan Daendels maupun Raffles yaitu para bupati tetap dijadikan sebagai inlandsch bestuur. Kekuasaan bupati di kabupaten dikurangi kekuasaannya (Schrieche, op.cit : 75). Dengan adanya pengurangan kekuasaan tersebut, para bupati sebagai pegawai biasa. Mereka yang dahulu boleh melakukan perdagangan, akhirnya dilarang.

Adapun pegawai pemerintah dari bangsa Belanda dinamakan binnelandsch Besteuur (Pemerintah Dalam negeri atau Kepegawaian Eropa). Jabatan tertinggi dalam struktur kepegawaian di bawah gubernur adalah residen, asisten residen, kontrolir, aspirin kontrolir (Hiroyoshi Kano, 1984:36).

Struktur jabatan pada pegawai pribumi (inlandsch bestuur) mulai dari jabatan tertinggi yaitu bupati. Setelah bupati adalah Patih, Wedana, Camat, dan Pamong desa. pamong desa yaitu lurah, wakil lurah, carik, ulu-lulu, dan jagabaya (Hiracashi Kano, ibid; Heather Sutherland, 1983:47).

Menurut Konstitusi 1854 (Regeeringsreglement) pasal 69 menyatakan :

Bupati-bupati dipilih oleh Gubernur Jenderal dari kalangan penduduk pribumi. (Schrieche, op.cit : 58, Heather Sutherland, ibid;47). Jabatan bupati berdasarkan sistem pewarisan, disamping ada syarat seperti cakap, rajin, jujur dan setia.

Sedangkan jabatan yang lebih rendah seperti patih sampai asisten wedana berasal dari tokoh-tokoh besar masyarakat setempat (Heather Sutherland, ibid).

Pada pertengahan abad XIX yaitu tahun 1855 berdiri Departemen Keuangan, Departemen Sarana dan Hak Guna tanah, Departemen Produksi dan Cadangan sipil, Departemen Budi daya, dan Departemen Pekerjaan Umum. Tahun 1866 ditambah lagi 4 Departemen baru meliputi Departemen Dalam negeri, Departemen Pendidikan, Departemen keagamaan, dan Departemen Industri, sedangkan Departemen Kehakiman didirikan tahun 1870. Pada tahun 1904 Departemen Pertanian digabung kedalam Departemen Perindustrian dan Perdagangan (Heather Sutherland. ibid: 49).

Pada tahun 1900-an terjadi perubahan besar yaitu *Politik Etis* dimana salah satu faktor adalah segi pendidikan. Salah satu tujuan pendidikan disini adalah dalam rangka menghasilkan tenaga untuk menjadi pegawai (A.K. Pringgodigdo, 1980:XI). Dengan berdirinya sekolah-sekolah itu, mengakibatkan lahirnya elit fungsional yang menjadi pegawai pemerintah Belanda dan elit politik yang memimpin organisasi pergerakan nasional (Heather Sutherland op.cit:92).

Para pangreh praja sebagai bagian birokrasi Kolonial Belanda sangat dibenci oleh rakyat. Umumnya mereka sangat menindas bangsanya ini dapat digambarkan oleh novel yang terkenal yaitu Max Havelar, karangan DR Douwes Dekker (Heather Sutherland, op.cit : 92).

Dalam masa akhir kolonial Belanda, para pangreh praja di dalam batas-batas peranan tradisional dan fungsi Kolonialnya telah berusaha sebaik-baiknya untuk beradaptasi dengan dunia yang sedang berubah. Kenyataan bahwa mereka nampaknya tak disenangi siapapun, lebih banyak disebabkan oleh kesulitan-kesulitannya dalam situasi yang tengah mengalami polarisasi dari pada oleh suatu kegagalan menyeluruh dari tugas dinasnya. (Heather Sutherland, Op.cit : 256).

Tetapi walaupun terdapat masalah-masalah yang tak terhindarkan, sampai tahun 1942 para pejabat pribumi ini tidak memperoleh keuntungan pengetahuan secara tepat dimana mereka itu tak ragu-ragu melawan semua pengecoh rezim yang berkuasa. Namun tatkala perang Dunia II meletus, dan pulau Jawa diduduki Jepang, maka permainan politik berubah secara drastis.

Pada masa pemerintahan pendudukan jepang, orang-orang yang menentang tingkah laku pangreh praja, seperti kelompok Islam dan kaum nasionalis sekuler, diangkat oleh pemerintah jepang seperti ini prinsip turun-temurun tentang jabatan dihapuskan (heather Sutherland, ibid:257). Gaji mereka juga dikurangi sampai setengahnya.

Para pangreh praja ini dalam masa pendudukan Jepang tidak boleh memasuki *Putera* (pusat tenaga rakyat), sebuah organisasi politik yang didalamnya hidup subur rasa benci kepada pangreh praja, sedangkan Masyumi organisasi Islam, dengan baik berlomba melawan pejabat pribumi untuk mempengaruhi rakyat.

Kemudian pada awal tahun 1944, jepang memutuskan untuk membina korps itu dengan tujuan untuk melemahkan gerakan nasionalis, dan mengganti *Putera* dengan *Djawa Hokokai*, suatu organisasi massa yang paralel dengan dinas kepegawaian sipil dan sebagian besar dipimpin oleh para pejabat (Heather Sutherland, ibid, 258; Harry J. Banda, 1980 : 207). dan pangreh praja dicap sebagai Nippon.

Kebijaksanaan jepang untuk kembali bersandar secara politik pangreh praja memperkuat struktur antara pemerintah militernya dengan negara kolonial belanda. memang *ethos* dan gayanya berbeda, namun kerangka kerjanya sama saja. Baik politik Belanda maupun politik Jepang ditentukan ditempat yang sangat jauh dari Jawa. Baik Tokyo maupun Den Haag tidak mempunyai perhatian yang sungguh-sungguh pada pendapat umum di Indonesia. Sifat yang tak bisa kompromi kedua rezim tersebut, memaksa para pangreh tersebut menjalankan tugas rangkap mereka secara diam-diam

dalam bidang administrasi dan pengawasan politik, karena di bawah pemerintahan kolonial Belanda maupun Jepang, pangreh praja merupakan jaminan penting bagi kepatuhan rakyat kepada garis politik tuannya (Heather Sutherland; *ibid*: 258). Walaupun terdapat kesinambungan ini, namun *ethos* baru dan perubahan-perubahan yang drastis di dalam politik, telah membuat priyayi pemerintah sadar akan kerentanannya. Mereka tergantung kepada kekuasaan besar (rakyat) Jakarta, tetapi Jakarta tidak lagi dapat diduga, dan kadang-kadang menunggu orang-orang yang mengabdikan kepadanya.

Pangreh praja tetap merupakan kerangka yang harus ada bagi Pemerintahan kolonial Belanda. Karena Jepang maupun Belanda memerlukan pangreh praja dalam rangka melaksanakan kontrol administratif dan kontrol politik.

Ketika perang Dunia II nyaris selesai, hubungan antara priyayi (pangreh praja) dengan pemimpin politik yang kemudian hari menjadi pemimpin negara Indonesia, menjadi tegang dan tak menentu saling tidak percaya-mempercayai tetap berkembang. Dimata kaum nasionalis, para pangreh praja nampaknya sebagai kaum oportunist yang sudah tak dapat diperbaiki lagi; disamping masih setia kepada Kerajaan Belanda dan aspirasi feodalnya (Heather sutherland, *ibid*: 260). Kewibawaan Korps itu diperlemah pula oleh kekurangan-kekurangan yang dapat dipahami selama masa pendudukan Jepang, masa dimana terjadi inflasi dan kesulitan-kesulitan ekonomi, ketidaktentuan di bidang-bidang politik, dan gangguan-gangguan terhadap kerja rutin, menyebabkan pra pejabat itu tidak efektif sebagai administrator-administrator dan rentan terhadap cobaan. Bukan saja mereka gagal sebagai pelindung-pelindung rakyat, tetapi diantaranya mereka terdapat pula yang menyalah gunakan kedudukannya dengan melakukan korupsi. Prestise dan kharisma mereka dirubah pula oleh perlakuan sementara opsir Jepang yang merendahkan mereka. Keragu-raguan dan kecurangan dilemparkan kembali oleh kaum nasionalis terhadap pangreh praja.

Pertentangan kolonial Jepang dengan pangreh praja disatu pihak dengan pemimpin-pemimpin pergerakan dan rakyat di pihak lain menyebabkan administrasi pemerintahan kacau balau memberikan iklim yang baik untuk meletusnya revolusi kemerdekaan.

Sesudah proklamasi Republik Indonesia tanggal 17 Agustus 1945 dapat diperkirakan bahwa kemerdekaan akan memperkuat pengontrolan secara umum terhadap birokrasi. Ini dapat diperolehnya seperti dalam revolusi yang dapat menimbulkan kegiatan spontan dari massa yang berjumlah besar dan akhirnya dapat dihimpun menjadi konstitusi parlemen yang ultra demokratis pada tahun 1950 (Lance Castle, 1983,21).

Namun ketika Belanda datang dan berusaha kembali menegakkan kekuasaannya, para pejabat itu terperangkap antara NICA (Netherlands Indies Civil Administration), yakni pemerintah sipil Hindia Belanda dan Republik Indonesia. Keduanya sama-sama menuntut "loyalitas" pangreh praja.

Selama bulan-bulan yang penuh kekacauan politik setelah Jepang menyerah, para pejabat itu menduduki posisi yang tidak menyenangkan. Mereka menghadapi bukan saja tuntutan-tuntutan yang bertentangan dari rezim kolonial dan penguasa nasionalis, melainkan juga pemberontakan-pemberontakan setempat menentang kekuasaannya. Dalam

berkecamuknya "revolusi-revolusi sosial" di Tangerang, Banten, Bojonegoro, Pati, Pekalongan, Cirebon, dan Solo, para pejabat itu diserang dan kekuasaannya diambil alih oleh kelompok-kelompok keagamaan dan Republikan. Reaksi-reaksi itu merupakan gejala dari komitmen yang dalam antara gaya dan citra kepegawaian sipil, serta rasa komitmen yang tinggi pada kedaulatan rakyat dan semangat anti Belanda pada masa itu (Heather Sutherland: op.cit : 261). Ketidakpercayaan terhadap korps yang elit itu dinyatakan secara lebih tenang didalam penanaman kembali korps itu pada bulan juli 1946, yang bukan lagi pangreh praja ("penguasa kerajaan"), tetapi pamong praja ("abdi" atau "pengasuh kerajaan"). tugas kewajiban para pejabat ini tidaklah untuk memerintah, akan tetapi bagaikan orang-orang tua yang "memimpin dan mempengaruhi dari belakang". Penampilan profil yang rendah hati itu secara taktik diterima oleh kebanyakan priyayi selama tahun-tahun perjuangan 1945-1949 (Heather Sutherland; ibid: 261).

Jumlah pegawai negeri yang terdiri dari sipil dan militer pada tahun 1951 sekitar 200.000 orang, sedangkan pada tahun 1953 bertambah menjadi 370.000 orang (Lance Castle, op.cit). Peningkatan ini disebabkan oleh adanya penggabungan birokrasi republik dengan Federal sesudah perundingan perdamaian dengan Belanda. Ini berarti sungguh tidak hanya menjadi tambahan beban berat bagi birokrasi dalam masyarakat, tetapi karena tambahan ini melampaui kapasitas ekonomi yang menopangnya.

Pengurangan jumlah anggota militer dan sipil menjadi masalah politik yang penting pada tahun 1953. Departemen keuangan mengusahakan pengurangan 60.000 prajurit, 60.000 pegawai sipil, dan 30.000 polisi. Upaya untuk mengadakan pengurangan seperti itu tidak berhasil. Inilah yang menjadi sebab utama kenapat kepemimpinan politik "administrator" dalam kabinet-kabinet terdahulu sipil yang akhirnya secara politik gagal. Bahkan yang mesti ditekan, birokrasi militer sipil yang akhirnya berkembang yaitu : pada tahun 1968 ABRI mempunyai pegawai militer sebanyak 597.000 orang dan pegawai sipil 232.000. Sedangkan pemerintah pusat mempunyai pegawai sipil 597.000 orang, disamping 755.000 orang dalam pemerintah daerah dan 815.000 orang di perusahaan negara. Angka ini tidak termasuk pekerja sementara dan pekerja harian (Lance Castle ibid 23). Banyaknya jumlah pegawai yang terpusat di kota-kota besar dan kurangnya pegawai di pedesaan menimbulkan pemborosan keuangan negara.

Akibat kegagalan untuk mengurangi jumlah pegawai adalah merosotnya nilai gaji, karena tekanan inflasi. Hal ini pada gilirannya merajalelanya korupsi. Ada pula sebab-sebab lain. Pekerjaan rutin dan norma-norma administratif digoyahkan oleh suasana revolusi dan upaya untuk memperbaikinya dikecam sebagai pikiran Belanda ("Dutch thinking"). Usaha untuk memantapkan kelas usahawan pribumi supaya dapat menjadi pendorong utama agi korupsi, terutama berkaitan dengan kebutuhan-kebutuhan partai dalam kampanye politik yang lama menjelang pemilu tahun 1955 (Lance Castle, ibid:24).

Pada jaman Demokrasi Terpimpin (1958-1966), rejim baru Sukarno mengawali dengan "lompatan" birokrasi yang jauh yaitu pengambilan perusahaan asing (nasionalisasi) di sektor perkebunan, bank, dan perusahaan dagang Belanda. Meskipun nasionalisasi itu mula-mula dikerjakan oleh perserikatan buruh radikal tanpa persetujuan kabinet, perwira-

perwira ABRI kebanyakan ditempatkan pada posisi-posisi manajemen. Beberapa pengamat memperkirakan bahwa nasionalisasi akan memudahkan pemecahan dan penanganan masalah ekonomi dengan cara baru, yang nampaknya tidak mungkin selama ada orang asing yang mengendalikan sektor-sektor penting. Tapi dalam praktek, harta kekayaan baru itu pada umumnya salah kelola dan disalah gunakan untuk pribadi bagi kelas menejer baru. Mereka tidak meneger yang profesional sehingga perusahaan-perusahaan itu bangkrut. Mentalitas tunjangan khusus hidup kembali. Karena seluruh sektor ekonomi dibagi-bagikan pada "orang-orang tertentu" yang mempunyai posisi kunci atau golongan-golongan politik yang berpengaruh guna perlindungan serta untuk menciptakan keuntungan birokrasi (Lance Casles, *ibid*:24).

Pada masa demokrasi terpimpin itu, para birokrat disibukkan dengan slogan "politik adalah panglima". Sehingga suasana untuk memantapkan peranan aparaturnegara dalam arti netral, yakni membuat aparaturnegara melaksanakan tugas-tugasnya sebagaimana mestinya, tidak terlaksana dengan baik (Sondang P. Siagian, *1980*:45). Persoalan ekonomi menjadi terabaikan, dan menyebabkan inflasi menjadi-jadi. Hampir tidak memungkinkan untuk membuat anggaran yang sehat dan mengendalikan fiskal upaya untuk "memimpin" ekonomi dalam keadaan semacam ini berarti hanya lebih banyak kesempatan bagi para birokrat untuk membuat kacau dan mengeksploitir sektor swasta. Kedudukan rakyat menjadi semakin melarat, semua bahan pokok menghilang dan daya beli rendah. Rakyat antri makanan pokok bulgur.

Pada masa orde lama itu sebelum meletusnya Gerakan 30 September (G. 30 S. PKI), para pegawai negeri baik sipil maupun militer terpecah belah dalam ideologi politiknya. Sehingga tugas mereka lebih mementingkan kegiatan politik dari pada tugas-tugas negara. Berkembang indoktrinasi anto kapitalis, kolonialis dan komodhisto phobi dari pejabat tertinggi sampai ke RT/RW.

Sedangkan pada masa kolonial Belanda, para pegawai pemerintah umumnya tidak begitu tertarik kepada masalah politik. Hanya sedikit sekali yang tertarik kepada kegiatan politik. Sehingga birokrasi pada masa kolonial Belanda disebut *beamtensat* yang a politik (Heather Sutherland, *op.cit* : 247).

Pada masa pemerintahan orde baru yang dipimpin oleh Jendral Suharto, tahun-tahun pertama menunjukkan sedang mengembalikan birokrasi yang kacau dan tidak bertanggung jawab menjadi birokrasi yang efisien, jujur, bertanggung jawab dan menghargai hukum. Akan tetapi kemudian terlihat bahwa kecenderungan yang mengandung harapan tersebut tidak kuat melawan kecenderungan yang menuju kepada birokrasi yang tidak bertanggung jawab kembali (yahya Muhaimin, 1980:25). Disamping adanya apa yang disebut "bureaucratic streamlining", juga kekuatan-kekuatan di luar aparat birokrasi telah menjadi impoten.

Perekonomian yang tumbuh dengan pesatnya disamping membanjirnya penanaman modal asing, telah menjadi sumber penghidupan aparat birokrasi secara "tidak wajar". Pemegang -pemegang *apomage* terbesar dari orde baru di Pertamina, Bulog dan Bea cukai, misalnya telah memetik keuntungan yang unik jauh melebihi yang dilakukan

oleh para *penggawa* pada masa kerajaan Mataram (Yahya Muhaimin, *ibid* : 25; Lance Castle, *op.cit* : 28). Upaya menanggulangi korupsi belum dilaksanakan sepenuhnya. Sesudah membiarkan pers membeberkan banyak penyelewengan, penguasa mengambil kebijakan menutup pers dari pada menghentikan keruwetan. Penyelewengan terselubung masih berjalan.

Dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1993 dijelaskan bahwa pembinaan kepegawaian negara yang mantap dengan pengembangan karir berdasarkan prestasi kerja, kematapan sikap mental berdasarkan pancasila dan UUD 1945 terus ditingkatkan secara berencana melalui upaya pendidikan dan pelatihan, penugasan, bimbingan dan konsultasi, serta melebihi pembangunan motivasi, kode etik, dan disiplin kedinasan yang sehat didukung sistem informasi kepegawaian yang mantap serta dilengkapi sistem pemberian penghargaan yang wajar.

Bahkan untuk mengefesienkan dan mengefektifkan pegawai negeri, pemerintah mulai tahun 1995 akan menjadikan hari kerja dalam seminggu biasanya 6 hari akan kerja menjadi 5 hari kerja. Ini bukan berarti mengurangi produktifitas pegawai negeri, bahkan produktifitas tersebut diharapkan bertambah. Karena jam kerja yang biasanya dimulai dari pukul 08.00 pagi sampai pukul 15.00 sore, akan diperpanjang menjadi pukul 16.30 atau pukul 17.00.

Jam kerja tersebut sudah diuji coba pada jajaran Pemda DKI Jakarta sejak tahun 1991. menurut pengamatan yang berwenang lebih efektif dan berhasil bekerja hanya 5 hari dalam seminggu. hari libur dua (2) hari tersebut dapat dipergunakan untuk keluarga pegawai khususnya dalam berkomunikasi antara orang tua dengan anak-anaknya. Disamping pengeluaran biaya kantor seperti listrik, telepon, dapat dihemat, dan juga transportasi pegawai.

Dengan adanya kerja 5 hari dalam seminggu, diharapkan etos kerja pegawai negeri tetap tinggi dan juga kesejahteraannya semakin bertambah. Itulah dambaan bagi masyarakat yang selalu akan berhubungan dengan aparat birokrasi yang merupakan mata rantai kehidupan ini. Sebab tanpa adanya etos kerja yang tinggi dan kesejahteraan yang semakin bertambah, pelayanan aparat birokrasi akan menyusahkan masyarakat yang akhirnya menimbulkan dampak negatif, seperti uang pelicin untuk segala urusan agar supaya menjadi cepat. Sistem karir sebagai motivasi atas kerja belum membudaya, demikian pula keteladanan pemimpin masih jauh dari harapan kita.

3.2. Pegawai Swasta

Pegawai swasta mempunyai sistem rekrutmen, penempatan, pengawasan, mutasi, penggajian atas dasar sistem karir yang professional sehingga produktivitas, efektifitas dan efisiensi berjalan baik. Dalam birokrasi sistem inibaru pada titik awal jauh tertinggal dibanding dengan swasta.

Berabad-abad sejak jaman klasik hingga jaman modern, kerja senantiasa diberi makna yang sama yaitu pengabdian. Orang-orang yang bekerja di luar birokrasi (pegawai

negeri) biasanya disebut sebagai karyawan swasta (pegawai swasta) atau juga disebut sebagai buruh (labour). Kadang kala karyawan swasta ini (pegawai swasta) dikategorikan dengan sebutan sektor formal; untuk membedakan pekerjaan di sektor informal yang juga merupakan lapangan kerja (Priyono tjiptohariyanto, 1989:29).

Di Indonesia karyawan swasta (pegawai swasta) diurus oleh FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) yang sekarang berubah menjadi SPSI (Serikat Pekerja Seluruh Indonesia). Federasi Buruh seluruh Indonesia lahir pada tanggal 20 Februari 1973. tidak terlepas dari pada sistem politik dan ekonomi orde baru. Kelahiran organisasi buruh ini diawali setahun sebelumnya tahun 1972 oleh penciptaan jumlah partai politik dari 10 menjadi 2 partai politik dan golongan karya (GOLKAR). Dalam tahun-tahun tersebut kondisi perekonomian Indonesia terasa amat buruk dan berbagai sektor pembangunan amat pincang. Barang-barang kebutuhan pokok rakyat yang sebahagian besar dikuasai golongan ekonomi non pribumi (Cina) sudah tidak dikendalikan oleh pemerintah. Harga barang-barang (sembilan bahan pokok) mengalami kenaikan yang amat drastis. Disini upah buruh tidak mengalami kenaikan, sehingga upah buruh yang relatif kecil itu keras bersaing dengan kenaikan harga (Buntaran Sanusi, 1981:L25).

Bersamaan dengan masalah tadi, usaha kaum buruh untuk memperbaiki kehidupannya terdesak oleh masalah nasional yang perlu pemecahan segera, yaitu masalah pengangguran merupakan "momok" bagi pembangunan ekonomi serta benalu bagi pendapatan perkapita. Karenanya pemecahan masalah ini merupakan suatu kegiatan yang terpadu antara pertumbuhan ekonomi dan industri serta perluasan kesempatan kerja serta penciptaan lapangan kerja di semua sektor ekonomi tradisional untuk mengimbangi lambatnya penciptaan lapangan kerja baru di sektor modern.

Selain akan tanggung jawabnya dan senantiasa siap untuk membangun, maka kaum buruh Indonesia yang mulanya terpisah-pisah, dalam vaksentral-vaksentral yang berada di bawah (ouderbouw) salah satu partai yang ketika itu sudah berfungsi dalam 2 parpol dan golkar, akhirnya mereka mengerahkan segala potensi dalam suatu wadah organisasi, FBSI (Federal buruh seluruh Indonesia) yang menghimpun seluruh kekuatan buruh di semua lapangan pekerjaan untuk diarahkan partisipasinya dalam peningkatan produksi yang merupakan bagian terpisah dari pembangunan nasional (Buntaran Sanusi. ibid:25-26).

Secara empirik posisi buruh Indonesia masih terpepet dan jadi bulan-bulanan empuk para majikan serta lembaga-lembaga lain yang mengetahui kelemahan ini. Para buruh biasanya sering ditekan dengan berbagai kewajiban yang harus dilaksanakan; sementara yang mereka terima tetap rendah. Biasanya bila mereka mengadakan pemogokan (unjuk rasa) dalam rangka menuntut standart gaji maupun tunjangan lainnya, mereka biasanya mengalami hambatan. Artinya bahwa tuntutan para buruh sering kali tidak mendapat tanggapan dari majikan. Dan yang lebih tidak mengenakan adalah bahwa mereka biasanya berhadapan dengan aparat keamanan (polisi beserta tentara) yang sengaja disewa majikan untuk meredam tuntutan (amukan) para buruh.

Upah yang rendah sebagai daya tarik bagi investor untuk menanamkan investasinya

di Indonesia, seringkali digembar-gemborkan oleh para pejabat negara. Ini seakan-akan menggambarkan bahwa slogan-slogan upah murah tersebut merupakan secara tidak langsung menjual kemiskinan kepada pihak luar. Upah buruh yang rendah dijadikan sebagai bahan untuk menarik investor asing. Dan secara moral Pancasila tindakan mendung-dungungkan upah murah untuk menarik investor asing, tidak Pancasila. Sebab disitu ada nilai eksploitasi terhadap kelompok-kelompok yang lebih lemah. Bahkan orang yang menggembor-gemborkan upah murah itu merasa bangga di forum internasional tersebut, tidak manusiawi. Buruh yang selalu mogok karena upah yang rendah itu hampir terjadi setiap minggu terutama pada investor garmen, tekstil, sepatu dan elektronika.

Memang tidak semua karyawan swasta (pegawai swasta) menerima upah rendah. Ini dapat dilihat dari sektor industri yang padat modal, seperti perbankan, hotel, pengeboran minyak dan sebagainya. Upah karyawannya boleh dibilang lebih tinggi dari pada pegawai biasa; seperti memakai dasi, berkendara pribadi, bertempat tinggal di perumahan eksklusif. Tapi jumlah mereka itu hanya minoritas dari populasi tenaga kerja.

Untuk menentukan standar upah di DKI Jakarta khususnya, maka pemerintah melalui Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia mengeluarkan keputusannya nomor kep 461/Men 1993 20 Desember 1993 tentang : peningkatan upah regional DKI Jakarta bahwa upah mulai dari Rp. 3.000,- per hari menjadi 3.800,- sedangkan gaji perbulan Rp. 112.00,-. Sedangkan standar jam kerja adalah 7 jam sehari bila hari kerjanya 6 hari perminggu dan 8 jam kerja bila hari kerjanya 5 hari dalam seminggu.

Standar upah minimum tersebut diupayakan untuk mensejahterakan karyawan dan meningkatkan produktifitas dengan adanya produktifitas yang tinggi, diharapkan akan meningkatkan produk-produk yang kemudian akan diekspor demi pembangunan nasional.

Produktifitas pegawai swasta menurut anggapan sementara orang lebih tinggi dari pada produktifitas pegawai negeri. Hal ini dimungkinkan oleh sistem kerjanya yaitu khususnya di sektor produksi yang ada di pabrik-pabrik yang bersifat mata rantai yang saling kait-mengkait. Bila satu mata rantai tidak berfungsi, niscaya mata rantai lainnya akan terganggu. Inipun dapat juga dilihat adanya 3 lapisan tenaga kerja (3 shift) dimana mesin industri selama 24 jam terus-menerus bekerja tanpa henti.

Untuk memelihara etos kerja para buruhnya, biasanya pihak majikan yang menghargai tenaga buruhnya, akan memberikan insentif (rangsangan) berupa bonus, tunjangan kesehatan dan fasilitas lainnya. Dan itu semua adalah tindakan yang wajar guna meningkatkan produksi.

Bonus adalah pemberian majikan kepada karyawan, yang bisa berupa uang ataupun saham perusahaan, karena majikan bersama karyawan telah berhasil memberi keuntungan kepada perusahaan dan diberikan bersamaan dengan laporan tahunan perusahaan (Suara Pembaharuan, minggu, 21 Agustus 1994, hal 2). Bonus itu bukan hak karyawan, akan tetapi suatu hadiah dari perusahaan. Pemberian ini tergantung dari apakah perusahaan mendapat keuntungan yang besar atau tidak.

Jika suatu perusahaan mendapat keuntungan yang besar, tetapi tidak memberikan

bonus kepada karyawannya, maka para karyawan akan melakukan tindakan-tindakan yang merugikan seperti "mencuri" milik perusahaan, mengkhianati perusahaan bahkan menipu perusahaan dengan meminta biaya perjalanan lebih lama dari pada yang sebenarnya ia lakukan. Meminta biaya pengobatan yang lebih dari pada yang sebenarnya ia telah keluarkan dan sebagainya.

Karena itu pemberian bonus itu penting agar etos kerja karyawan bekerja dengan setia dan tidak bertindak merugikan perusahaan. Mereka mengetahui dan menduduki jabatan yang tinggi di perusahaan menerima bonus tiap tahun, sedangkan karyawan menengah kebawah kurang dipikirkan perihal bonus mereka, sekalipun perusahaan dengan bantuan mereka selama ini dapat keuntungan besar dari tahun ke tahun.

Oleh karena itu tingkat pendidikan dan ketrampilan yang rendah bagi kebanyakan buruh-buruh di Indonesia, dapat mempengaruhi produktifitas. Ini juga dapat mempengaruhi tingkat upah seseorang. Bagi kebanyakan calon tenaga kerja yang berpendidikan mengengah, biasanya kurang siap pakai akibat tidak adanya keterampilan. Biasanya bila mereka memasuki lapangan pekerjaan, mereka dilatih terlebih dahulu. Ilmu yang mereka pelajari di bangku sekolah terasa kurang berguna didalam kehidupan dunia kerja.

Oleh karena itu dalam memasuki pelita VI ini Departemen Tenaga Kerja bersama-sama Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengadakan ikatan kerja sama yaitu para siswa dianjurkan untuk magang di pabrik, kantor guna melihat dunia kerja yang lebih dekat, ataupun di balai latihan kerja yang dimiliki Departemen Tenaga Kerja.

Biasanya pula dalam mengisi hari libur sekolah, para siswa mengadakan kegiatan seperti membantu atau magang di Departement Store, pasar swalayan, pabrik, kantor pemerintah. Kegiatan semacam itu dilaksanakan oleh Kantor wilayah Depdikbud DKI Jakarta khususnya bekerjasama dengan instansi terkait maupun pihak swasta.

Umumnya para pemilik perusahaan swasta dalam mencari calon tenaga kerja adalah calon tenaga kerja yang sudah berpengalaman. Ini dapat dilihat di iklan-iklan yang ada di media massa (Surat kabar, majalah). Akibat dari hal tersebut adalah secara tidak langsung akan merusak dunia tenaga kerja yang sudah ada; yaitu adanya "pembajakan" tenaga kerja dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain.

Selama tahun 1992, pencari kerja di DKI Jakarta yang tercatat di kantor wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta sebanyak 54.055 orang, sedangkan tenaga kerja yang diperlukan berjumlah 11.365 orang. Akan tetapi yang terserap hanya 83.031 orang (Jakarta Dalam Angka 1993, kantor statistik DKI Jakarta: 72).

Dari data tersebut dapat terlihat bahwa penyerapan tenaga kerja dengan jumlah tenaga kerja tidak sebanding yaitu hanya sekitar 15% dari jumlah tenaga kerja. Sedangkan lapangan tenaga kerja yang tersedia sekitar 20% dari jumlah pencari kerja. Ini merupakan tantangan bagi pemerintah yang diamanati oleh UUD 1945 dimana pada pasal 27 ayat 2 dikatakan : Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Dalam memasuki Pelita VI. untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia menuju masyarakat industri (modern) GBHN 1993 mengamanatkan bahwa pembangunan

tenaga kerja dalam rangka menciptakan lapangan kerja dan mengurangi pengangguran serta pengembangan sumber daya manusia diarahkan pada pembentukan tenaga kerja profesional yang mandiri dan beretos kerja tinggi dan produktif.

Salah satu usaha meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejak tahun 1990-an pemerintah mencanangkan wajib belajar 9 tahun bagi warga negara yang berusia 7 tahun hingga 15 tahun. Diharapkan dengan adanya program wajib belajar tersebut, sumber daya manusia yang berkualitas akan terbentuk. Karena pada kenyataannya tenaga kerja yang berpendidikan sekolah dasar 27,59%, SMTP 7,05%, SMTA 7,97%, dan perguruan tinggi 1,28%. Sedangkan yang tidak tamat sekolah dasar berjumlah 14,41%, dan tak pernah sekolah 21,71% (Hananto Sigit, 1989: 10).

3.3. Sektor informal

Tenaga kerja yang tidak tertampung di birokrasi, perusahaan swasta biasanya akan memasuki sektor informal. Sektor informal ini kadang kala disebut sebagai ekonomi bayangan atau ekonomi bawah tanah (*underground ekonomi*), sektor informal ini diartikan sebagai kegiatan apa saja mulai dari kegiatan di dalam rumah tangga, jual beli yang tidak dilaporkan ke dinas pajak, wanita bekerja tidak dibayar sampai dengan penggelapan pajak, pekerja gelap serta berbagai kegiatan perekonomian yang bertentangan dengan praktek ekonomi yang legal (Hans-Dieter Ever, 1991: 21).

Bagi kondisi Indonesia sektor informal ini adalah kegiatan sektor ekonomi marginal yang mempunyai ciri-ciri antara lain :

- a. Pola kegiatannya tidak teratur baik dalam arti waktu, permodalan maupun penerimaannya.
- b. Ia tidak tersentuh oleh peraturan-peraturan atau ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh pemerintah (sehingga kegiatannya sering dikategorikan "liar")
- c. Modal, peralatan dan perlengkapan maupun omzetnya biasanya kecil dan diusahakan atas dasar hitungan harian.
- d. Tidak membutuhkan keahlian atau ketrampilan khusus sehingga secara luas dapat menyerap bermacam-macam tingkatan tenaga kerja.
- e. Tidak mempunyai tempat yang tetap dan atau keterikatan dengan usaha-usaha lain (Soetjipto Wirosardjono, 1976: 25).

Yang dapat digolongkan kedalam kegiatan tenaga kerja sektor informal ini misalnya, tukang cukur, kuli-kuli bangunan, kuli pelabuhan, penjaja makanan dan minuman, pedagang keliling sayur, tukang minyak, tukang pijit, penjaja koran, tukang ojek, dsb.

Sektor informal ini adalah satu bentuk produksi yang dilakukan oleh sebagian besar masyarakat lapisan bawah. Kehadirannya di negara-negara ketiga atau kapitalis pinggiran, seperti Indonesia, berdampingan, atau berada diantara bentuk produksi subsisten (*peasant mode of production*) dan bentuk produksi kapitalis atau industri (*Capitalis mode of production*). Masalah sektor informal menjadi semakin genting karena pranata formal tidak mendukung eksistensi sektor informal dalam arti yang sebenarnya.

Pada tingkat pengambilan keputusan nasional, eksistensi kaum miskin sangat dilindungi, baik itu dalam UUD 1945 pasal 34, GBHN dan perangkat-perangkat hukum nasional lainnya. Tetapi pada tingkat pengambilan keputusan di daerah dan pelaksanaannya sehari-hari, keberadaan sektor informal justru terdiskriminasi dan tersisih.

Ada paradoksi pengambilan keputusan di tingkat pusat dan daerah serta paradoksi peraturan yang mendukung dan merusak keberadaan sektor informal. Ketika pemerintah pusat mengumandangkan jangankan pembangunan untuk memerangi kemiskinan, maka pemerintah daerah melakukan penertiban berbagai kegiatan ekonomi informal tanpa memberikan alternatif yang jelas.

Ketika Laksamana (purnawirawan) Sudomo menjadi Menteri koordinasi Politik dan keamanan (menko Polkam) mengeluarkan kebijakan operasi "Hari esok penuh harapan", para penjaja makanan di sekitar traffic light (lampu merah), diberikan pengarahan yaitu mereka disediakan tempat untuk berdagang di sekitar tempat pemberhentian bus (Halte Bus). Dan sebagian lagi ada yang diberikan latihan (training) di Balai Latihan Kerja (BLK) milik Departemen Tenaga Kerja yang kemudian di salurkan ke perusahaan tertentu.

Ternyata kebijakan (policy) tersebut tidak memecahkan masalah. Karena hampir setiap tahun para pencari kerja berdatangan ke DKI Jakarta. Mereka yang tidak mendapatkan pekerjaan, di sektor formal, mau tidak mau terjun di sektor informal. Disamping itu pula jumlah tenaga kerja lebih banyak dari tempat kerjanya. Apalagi programnya tidak berlanjut hanya seumur jagung. Harapan hari esok tinggal harapan.

Kemauan politik pemerintah membina lapangan kerja informal masih bersifat sektoral dan perundangan tentang usaha informal belum ada sehingga mereka tidak terlindungi dari penindasan pengusaha bermodal dan konglomerat yang bersifat monopoli dan oligopoli.

Padahal sektor informal ini berperan sebagai "bumper" yang bisa menampung luapan tenaga kerja murah. Mengapa sektor informal ini dianggap sebagai "bumper"? Antara lain karena ia mempunyai peran pengganti. Sektor informal di satu pihak merupakan peran pengganti. Sektor informal di satu pihak merupakan fungsi produksi konsumsi yang seringkali kehadirannya tidak terkait langsung dengan sektor ekonomi (industri) formal. namun ia memproduksi dan mengkonsumsi barang-barang dan jasa murah yang serupa atau mirip seperti yang diproduksi oleh sektor informal dan dikonsumsi oleh lapisan masyarakat borjuis kaya (Miftah Wirahadikusumah, 1991:33).

Sektor informal ini dapat dianggap pengganti fungsi produksi konsumsi sektor informal dan mampu menggantikan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor formal. Atas dasar itu, maka tidak terlalu mengherankan jika kaum pekerja lapisan bawah yang berpenghasilan rendah dan menengah-bawah mampu seakan-akan memiliki dan menikmati barang dan jasa yang dapat dihasilkan oleh sektor formal.

- Akibat selanjutnya, aspirasi "gaya hidup borjuis" dengan sendirinya dapat di transfer dari kaum elit kepada kaum pekerja berpenghasilan rendah. sebaliknya, yang tidak dapat ditransfer adalah pemilikan dan penguasaan "assets" kekayaan dan alat-alat produksi.

Pola "gaya hidup borjuis" lapisan atas dapat diikuti dan dinikmati oleh golongan pekerja dari lapisan bawah (massa). Peniruan ini dilakukan oleh sektor informal yang dapat memenuhi tuntutan aspirasi masyarakat berpendapatan rendah dengan selera "gaya hidup borjuis". Dengan bisa terpenuhinya aspirasi lapisan bawah, maka golongan pemilik modal cenderung untuk merasa aman; dalam arti mereka tidak merasakan ada kewajiban moral untuk mengatasi masalah kesenjangan sosial politik yang ada dan berkembang dalam masyarakat.

Melalui proses "transfer" budaya konsumsi borjuis dan "substitusi" produksi, mereka yang berada di posisi kuat (atas), sebenarnya telah terhindar atau diamankan dari tuntutan rasa keadilan sosial masyarakat lapisan bawah. Pengaruh demanstratif atau modernisasi pertumbuhan ekonomi, dan pola konsumsi massal, ternyata mengakibatkan masyarakat bawahpun seolah-olah ikut serta untuk melakukan proses produksi konsumsi di dalam sektor informal dengan barang (jenis dan merek) dan jasa yang serupa atau dengan barang dan jasa yang dihasilkan oleh sektor formal (Miftah Wirahadikusuma, *ibid*: 23).

Selain memerankan fungsi mengalihkan gaya hidup dan konsumsi produksi, sektor informal juga cenderung memiliki sifat sendiri yang tidak terkait secara langsung dengan struktur sektor ekonomi industri modern. Disamping itu golongan pekerja dengan kaum majikan dan pemilikan modal serta pemilikan alat produksi karena fungsi konsumsi produksi golongan buruh kelihatannya telah dipenuhi sektor informal yang setengah subsisten.

Di beberapa negara dunia ketiga dan juga Indonesia, pada awalnya sektior informal biasa dianggap sebagai sektor yang mengganggu ketertiban dan kebersihan kota. Akibatnya, seringkali tempat kegiatan usahanya dipindahkan atau bagi mereka yang mangkal di suatu lokasi baru akan berhadapan dengan para petugas penertiban kota. Secara ekonomi, sektor informal dianggap sebagai tidak efisien dan terbelakang. Meskipun pada akhirnya harus diakui bahwa dengan fungsinya yang bersifat ganda yakni fungsi produksi-konsumsi, sektor informal telah berperan sebagai "bumper" atau "katup pengaman" yang dapat mengalihkan lokasi antagonistik antara lapisan masyarakat atas yang kaya (kaum majikan, pemilik modal, dan pemilik alat-alat produksi) dengan lapisan masyarakat bawah (golongan pekerja murah) yang miskin (Miftah Wirahadikusuma, *ibid* : 34).

Lokasi antagonos atau konflik yang langsung kaum kapitalis dengan kaum buruh pada akhirnya dialihkan ke dalam sektor informal. Sehingga di dalam sektor informal itu dapat di jumpai suatu mekanisme kerjasama dan juga sekaligus suatu bentuk persaingan atau bahkan konflik yang cukup tajam serta struktur hubungan yang bersifat eksploitatif. Dari kondisi seperti itu, maka kita dapat menjumpai golongan masyarakat yang paling dieksploitasi.

Tenaga kerja di sektor informal merupakan pekerja-pekerja bebas dan pekerja-pekerja keluarga. Rata-rata mereka bekerja dalam waktu lebih dari pada buruh atau majikan (Soetjipto Wirosardjono. *loc.cit* : 27). Hal ini diduga justru karena para pekerja bebas dan pekerja keluarga dalam konteks ketenaga kerjaan di Indonesia kebanyakan terdiri dari mereka yang bekerja di sektor-sektor ekonomi informal dimana jam kerja

efektif mereka sangat bervariasi, tetapi rata-rata lebih pendek dari pada jam-jam bekerja dari sektor ekonomi formal.

Melihat kenyataan tersebut nampaknya bahwa etos kerja tenaga kerja disektor informal dapat dikategorikan rendah. hal ini disebabkan pengetahuan dan tingkat sosialnya rendah. Kaum informal seperti dituturkan Samuel Huntington merupakan sumber daya politik, tetapi kehilangan daya politiknya. Untuk memperjuangkan kepentingan mereka sendiri, potensi politik mereka lebih banyak dimanfaatkan oleh berbagai kelompok kepentingan (Didik J. Rachbini, 1991 : 7).

Temuan-temuan di lapangan menunjukkan bahwa sektor informal tidak saja berfungsi sebagai sumber daya politik, tetapi juga berperan sebagai sumber daya ekonomi. Misalnya ketersediaan tenaga kerja di dalam sektor ini menjadi akses potensial bagi ekonomi formal sehingga dengan mudah dapat menopang kelangsungan kegiatan usaha besar. Pemanfaatan golongan informal sebagai sumber daya ekonomi dijalin lewat mediasi proses politik. Sebagai sumber daya politik, sektor informal dijadikan obyek yang dikendalikan lewat organisasi massa pada partai pemerintahan, seperti organisasi koperasi pedagang kaki lima, organisasi koperasi super angkutan dsb. Ini berarti bahwa golongan informal sangat signifikan potensinya sebagai sumber daya politik dan ekonomi.

Akar masalah dari sektor informal bagaikan lingkaran setan. Sektor informal ini tidak terlepas dari masalah pengangguran baik di kota maupun di desa. Dengan sedikitnya kesempatan kerja dibandingkan jumlah tenaga kerja yang berlimpah, maka untuk keselamatan hidupnya mereka berusaha di sektor informal.

Pengangguran di perkotaan pada umumnya tidak terlepas dari pengangguran di pedesaan. Sedangkan pengangguran di pedesaan disebabkan oleh tidak terbukanya kesempatan kerja di sana. Sebab investasi lebih banyak berada di daerah perkotaan. Besarnya penyaluran kredit usaha kecil untuk masyarakat pedesaan tidak seimbang dengan besarnya penyaluran Kredit bagi usaha-usaha konglomerat berskala besar di perkotaan.

Akibanya terjadilah urbanisasi dari desa ke kota-kota, khususnya kota Jakarta. Buktinya, meskipun di Jakarta para migran tadi hidup sangat tidak layak, tetap saja arus migrasi tidak pernah surut dari tahun ketahun. menurut perkiraan jumlah tenaga kerja di sektor informal mendekati hampir 60% dari jumlah tenaga kerja yang ada.

Namun orang-orang lupa, bahwa sektor informal selama ini sesungguhnya adalah penampung yang menyelamatkan kehidupan jutaan kaum miskin di perkotaan. Untuk sementara sektor informal yang merupakan "kaum pinggir" berada diluar sentuhan kebijaksanaan. Fasilitas yang diberikan pemerintah terutama dalam permodalan dan tempat usaha belum menyentuh pengusaha kecil dan informal. Kredit Bank sebesar 20% yang semestinya jatah mereka pada kenyataannya tidak terlaksana malahan tersalurkan pula kepada konglomerat.

Perbaikan mulai dijalankan dalam memasuki pelita VI atau pembangunan jangka panjang tahap dua (PJPT II), pemerintah pusat (BAPENAS) bersama-sama pemerintah daerah mengeluarkan kebijakan yaitu proyek IDT (Inpres Desa Tertinggal), proyek ini

diharapkan untuk mendinamisir pembangunan di desa-desa miskin, atau perkampungan kumuh di daerah perkotaan. Diharapkan dengan adanya pembangunan di daerah-daerah miskin (kumuh), pemerataan pembangunan akan menjadi kenyataan. Seluruh masyarakat bersama-sama pemerintah membangun negara Indonesia menjadi negara yang adil dan berkemakmuran, makmur yang berkeadilan, sebagaimana yang sering dikumandangkan oleh Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan maupun dalam kunjungan ke daerah-daerah dalam temu muka kepada masyarakat pedesaan sewaktu meresmikan proyek-proyek.

Jumlah calon tenaga kerja yang tercatat dalam kantor Wilayah Departemen Tenaga Kerja DKI Jakarta 1992, sebanyak 54.055 orang. Sedangkan lowongan yang tersedia sebanyak 11.364 orang. Akan tetapi tenaga kerja yang terserap adalah 8.031 orang (*Jakarta Dalam Angka 1993*, kantor statistik DKI Jakarta : 72).

Melihat data ketenagakerjaan maupun lowongan kerja tersebut dapat dibayangkan bahwa jumlah tenaga kerja yang tidak tertampung lebih banyak dari pada yang tertampung, belum lagi yang tidak mendaftarkan di Kanwil Depnaker DKI Jakarta. Ini adalah suatu tantangan pembangunan yang suatu saat dapat membahayakan sendi-sendi stabilitas Nasional. Karena pengangguran tersebut merupakan salah satu tempat timbulnya kejahatan di lingkungan masyarakat.

BAB IV

PEMBANGUNAN EKONOMI DAN ETOS KERJA

Pembangunan ekonomi dan etos kerja tidak dapat dipisahkan menurut beberapa teoritis. Bahkan kalangan aliran teori modernisasi sangat mempercayai hubungan pembangunan ekonomi dengan etos kerja. Etos kerja sebagaimana telah dijelaskan dalam Bab II dibentuk atau dipengaruhi beberapa faktor serta, seperti faktor merantau, geografis, pendidikan dan sebagainya turut serta menggerakkan pembangunan ekonomi.

Menurut teoritis modernisasi, pembangunan ekonomi serta negara atau masyarakat dengan menggunakan pendekatan psikologis dan pendekatan kebudayaan berasumsi pokok yaitu bahwa kedua pendekatan tersebut bertolak dari dua konsep yang dipertentangkan yakni konsep masyarakat modern dan konsep masyarakat tradisional. Teori Modernisasi percaya hanya dengan memodernkan negara-negara berkembang, baik melalui manusianya maupun nilai-nilai budayanya ataupun kedua-duanya, barulah negara-negara tersebut dapat dibuat maju. Teori Modernisasi pada dasarnya mencari sebab-sebab kegagalan pembangunan didalam negara-negara berkembang itu sendiri. Peran negara-negara maju pada umumnya dianggap positif, yakni menularkan nilai-nilai modern disamping memberi bantuan modal dan teknologi (Arief Budiman, 1984: X-XI).

Akan tetapi teori modernisasi ini bersifat a-historis, yakni teori ini tidak atau kurang melihat persoalan dalam konteks kesejarahan negara-negara berkembang itu sendiri. Resep pembangunan yang ditawarkan dapat berlaku kapan saja, dimana saja; itu menurut mereka. Jadi, resep pembangunan yang sudah dicoba dan berhasil di Inggris pada abad XIX ketika revolusi industri, dianggap dapat juga, bahkan harus berhasil di negara-negara yang bersangkutan (Arief Budiman, *ibid* : XI).

Sementara itu muncul teori tandingan dari teori modernisasi yaitu teori Ketergantungan dan Keterbelakangan (*Dependency and Under development*). Teori ini didasarkan atas kerangka analisis Paul Bran yaitu bahwa interaksi ekonomi internasional dimana faktor modal dari negeri dimana produktifitas batasnya tinggi atau diharapkan akan tinggi untuk menuju keseimbangan pada keseluruhannya terjadi. Kendatipun terjadi pergerakan faktor modal antar negara (yaitu dari negeri maju ke negeri miskin), pergerakan ini hanyalah bertujuan untuk menyedot keuntungan dari miskin itu. Keuntungan yang disedot itu ternyata adalah merupakan bagian yang terbesar dari pertambahan pendapatan yang diakibatkan oleh adanya investasi asing sebagai akibat pergerakan faktor modal itu.

Naiknya pendapatan nasional di negara berkembang (miskin) itu sebagai akibat dari adanya investasi asing, tidaklah dinikmati oleh sebagian besar rakyat di negeri miskin. Karena adanya kepincangan dalam distribusi pendapatan. Pihak-pihak yang menikmati oleh sebagian besar rakyat di negeri miskin. Karena pihak-pihak yang menikmati keuntungan yang ditimbulkan oleh investasi asing ini, hanyalah terdiri dari segelintir kecil anggota masyarakat dan keuntungan ini diperoleh dari hasil suatu proses eksploitasi

(Sritua Arief dan Adi Sasono, 1981 : 7 - 8).

Tetapi memang ada persoalan dengan kedua teori besar itu dalam menanggapi kemunculan "4 negara kecil" yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, Singapura sebagai negara-negara industri baru (Newly Industrializing Countries = NIC's). Keberhasilan negara-negara industri baru ini bisa jadi merupakan "kekalahan" bagi teori ketergantungan, akan tetapi tidak serta merta "kemenangan" bagi teori modernisasi. Suksesnya pembangunan ekonomi NIC's ternyata tidak (belum) diikuti kehadiran sistem politik yang Liberal-demokratis seperti negara asal teori tersebut yaitu Amerika Serikat dan Eropa Barat, sistem politik yang otoriter ternyata lebih berdampingan erat dengan pembangunan ekonomi yang ada (Nur Imam Subeno, 1989: 22-23).

Mengingat kehadiran negara-negara industri baru telah menjadi obsesi bagi negara-negara berkembang lainnya untuk mengoboa mengadopsinya, maka pemahaman yang lebih utuh atas masing-masing negara menjadi soal yang mendasar. Secara interval, ini dapat dilacak melalui perbedaan latar belakang sejarah, luas wilayah, jumlah penduduk, dan sumber alam yang terbatas, kemudian pola pembangunan dan strategi industri yang terpilih, kaitannya dengan sektor industri dengan sektor agraris, pemanfaatan modal asing yang terarah dan juga peranan pemerintah dan negara. Sementara itu secara eksternal, dapat ditelusuri dalam sistem perdagangan dan moneter internasional yang meningkat serta kepentingan geopolitik dan geostrategis negara-negar adidaya. Dinamika dan interaksi diantara faktoir-faktor itu, yang dapat menggiring kita pada pemahaman yang lebih utuh dari kehadiran dan berkembangnya "4 negara kecil" yaitu Korea Selatan, Taiwan, Hongkong, dan Singapura, sebagai negara industri baru di Asia (Nur Imam Subeno, ibid : 23).

4.1. Pembangunan Ekonomi pada saat ini

Dalam memasuki Pembangunan Jangka Panjang II atau era tinggal landas, GBHN 1993 menitik beratkan Pembangunan di-takkan pada bidang ekonomi, yang merupakan penggerak utama pembangunan. Menurut Gubernur Bank Indonesia, pertumbuhan ekonomi tahun 1994/1995 diperkirakan lebih besar atau paling tidak sama besarnya dengan pertumbuhan ekonomi tahun 1993/1994 yakni sebesar 6,7% (Suara Pembaharuan, 9 Agustus 1994:1).

Pembangunan ekonomi secara mantap dimulai sejak tahun 1969 dimana pada waktu itu, Order Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto membuka lembaran baru untuk membangun Indonesia, dikarenakan pada masa itu sebelumnya Orde Lama lebih mementingkan pembangunan politik oleh sebab itu pada masa era Orde Lama pembangunan politik sebagai "panglima".

Sejak kelahiran Orde Baru atau sejak dimulainya Pelita I tahun 1969, tujuan pembangunan menjadi lebih jelas yaitu pertumbuhan ekonomi atau kenaikan pertumbuhan ekonomi atau kenaikan output. Tujuan ini nampaknya dilaksanakan secara konsisten melalui berbagai pola bidang kebijaksanaan ekonomi. Pada masa pelita II tatkala tanda-

tanda memburuknya kepincangan sosial, melebnarnya peranan ekonomi asing, bersamaan dengan terdesaknya posisi ekonomi pribumi, meluasnya kemiskinan, dan sebagainya, sudah semakin menonjol. Sementara itu, prestasi dari pertumbuhan penduduk 2,3% pertahun, maka pertumbuhan ekonomi yang tinggi, telah mengakibatkan kenaikan pendapatan perkapita rata-rata yang tinggi pula (Adi Sasono, 1982:44).

Pembangunan ekonomi pada era Orde Baru ditandai oleh Undang-Undang (UU) Penanaman Modal Asing (PMA) tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1967 dan Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri tahun 1968. Melalui undang-undang tersebut, pihak swasta berperan serta dalam pembangunan ekonomi Indonesia (Moh. Anwar Ibrahim, 1976:3).

Sebelum Orde Baru, pembangunan ekonomi, khususnya sektor Industri hanya terbatas pada perusahaan-perusahaan milik negara, baik yang dibangun berdasarkan Rencana Pembangunan Lima Tahun dari Biro Perancang Negara di bawah pimpinan almarhum Juanda tahun 1956, maupun sebagai hasil implementasi Rencana Pembangunan Nasional Semesta Berencana 8 tahun yang dicanangkan pada tahun 1961.

Pembangunan ekonomi khususnya di sektor industri dimulai dengan pengambil-alihan perusahaan-perusahaan Belanda dan sekutunya oleh pemerintah RI dan kemudian dilimpahkan pengelolaannya kepada Badan Pusat penyelenggaraan Industri dan Tambang (BAPPIT) seaktu revolusi Kemerdekaan. Pengambil alihan (nasionalisasi) ini mencapai puncaknya pada tahun 1957 dengan memburuknya hubungan diplomatik antara RI dan Belanda sebagai akibat dari aksi pembebasan Irian Barat (Irian Jaya sekarang). Selama periode itu timbul kesulitan dalam mengelola perusahaan-perusahaan tersebut, baik karena langkanya tenaga ahli dan mode maupun karena besarnya ketergantungan kepada suku-cadang (Spare-parts) mesin-mesin yang sebaian besar dari Belanda (Moh. Anwar Ibrahim, ibid:14).

Tenaga-tenaga yang ada pada umumnya berpendidikan Tehnik Menengah dari Zaman Belanda yang dalam segala kekurangannya masih mampu mempertahankan beberapa industri tersebut dari kehancuran total. Sementara sarjana-sarjana tehnik kita pada waktu itu sebagian terbesar adalah lulusan jurusan sipil yang sebenarnya kurang tepat untuk menjalankan industri-industri yang baru. Industri-industri yang ada pada waktu itu antara lain pabrik semen Indarung, Pabrik ban good Year, Pabrik sendaja dan mesin di Bandung (Pindad, sekarang), Pabrik Kertas di Leces dan Padalarang, Pabrik Zat asam Hook's di Jakarta dan lain-lain (Moh. Anwar Ibrahim, ibid : 4).

Apa yang terjadi pada masa Orde Lama merupakan pengalaman yang berharga bagi kelanjutan pembangunan ekonomi, khususnya industri. Iklim ekonomi terpimpin segera beralih ke iklim demokrasi ekonomi (Kapitalis Terpimpin, menurut versi Adi Sasono) dimana pihak swasta diberi kesempatan untuk mengembangkan inisiatifnya.

Namun tidak semua dapat menyesuaikan diri dengan iklim baru tersebut. Industri minuman kecil seperti pabrik limun lokal, sekarang sudah tergusur oleh industri minuman Coca-cola dari AS. Pasar-pasar swalayan, Departemen Store dapat menyisihkan

pasar-pasar tradisional, dan lain-lainnya. Dengan adanya industri, bukan semua persoalan ekonomi akan terselesaikan, bahkan sebaliknya industri-industri kecil, akan tersingkirkan oleh industri-industri besar. Sebab industri besar dapat menghancurkan industri kecil dengan cara seperti politik dumping atau "banting harga". Disamping itu pula industri besar, dewasa ini mempunyai jaringan mata rantai yang panjang mulai dari hulu sampai hilirnya.

Seiring dengan majunya pembangunan ekonomi yang secara intensif dimana adanya dukungan stabilitas nasional yang dinamis, banyak berdiri pabrik-pabrik, khususnya di DKI Jakarta. Di Kelurahan Ciracas, Kecamatan Ciracas, Kotamadya Jakarta Timur sebagai daerah penelitian, banyak berdiri pabrik.

Menurut *Laporan Tahunan Kelurahan Ciracas* tahun 1993/1994, tercatat 38 industri besar dan kecil antara lain :

1. PT. Sarimi
2. PT. Menara Jaya
3. CV. Sri Wenda
4. PT. Monde Biscuit
5. PT. Cicero Indonesia
6. PT. Della Prakasa
7. PT. Tastan
8. PT. Multi Dimensi
9. PT. Cipta Wahana Karya
10. PT. SCTI
11. PT. Khong Guan
12. PT. Centex
13. PT. Tan Sri Ghani
14. PT. Nelco
15. PT. NGK Busi
16. PT. Mustika Ratu
17. PT. Prem Boutleng
18. PT. Inti Indo Maju
19. PT. Multi Dimensi
20. PT. Trans Gobel

Industri di wilayah Kelurahan Ciracas tersebut diperuntukan untuk kebutuhan dalam negeri maupun keperluan ekspor. Sedangkan tenaga kerjanya kebanyakan dari warga Kelurahan Ciracas juga luar daerah tersebut. Bahkan penduduk daerah yang sekarang sudah menjadi warga DKI Jakarta banyak yang bekerja di kawasan ini.

Pada waktu itu industri (pabrik) di wilayah kelurahan Ciracas masih sedikit yaitu awal tahun 1970-an, jumlah penduduknya masih berjumlah sekitar 10.000 jiwa. Pada saat ini (1994) jumlah penduduknya mencapai 34.055 jiwa. Pertambahan penduduk yang 3 kali lipat ini disamping pertambahan alami (kelahiran), juga adanya pendatang yang mendiami kawasan kelurahan Ciracas ini. Arus urbanisasi dari luar DKI Jakarta menuju Jakarta

hampir setiap tahun terus bertambah.

Adapun Sarana perekonomian yang ada di wilayah Kelurahan Ciracas untuk kebutuhan warganya selain pasar inpres terdapat toko yang berjumlah 120 buah, warung 171 buah, pedagang kaki lima 15 buah, material (Toko Bangunan) 121 buah, lainnya 38 buah (laporan tahunan Kelurahan Ciracas 1993/1994:20). Biasanya sarana perekonomian tersebut hanya menjual kebutuhan bahan sehari-hari. Bila warga Kelurahan Ciracas ingin lebih memiliki barang-barang yang lebih up to date atau yang sedang "in", biasanya mereka pergi ke luar wilayah ciracas, seperti ke Pasar Kramat Jati Indah, Pasar Baru, Pasar Blok M (Melawai), Pasar Senen, dsb.

Meskipun pembangunan ekonomi pada saat ini begitu gencarnya yang ditandai banyaknya berdirinya bangunan-bangunan bertingkat seperti gedung-gedung pencakar langit untuk hotel maupun perkantoran baik milik pemerintah dan swasta, di DKI Jakarta ini, kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat belum dapat terpenuhi. Ini dapat dilihat adanya pengrusakan di satu pihak yang utama korbannya adalah lapisan masyarakat bawah. Di lain pihak tumbuh bangunan-bangunan megah yang diperuntukkan bagi masyarakat lapisan menengah ke atas.

Pusat-pusat perbelanjaan banyak dikunjungi Konsumen maupun masyarakat yang sekedar melihat-lihat saja, secara tidak langsung kesejahteraan masyarakat mulai nampak. Industri perdagangan eceran (Retail Business) di DKI Jakarta ini semakin marak.

Bagi masyarakat "the have" tidak perlu lagi berbelanja (shopping) ke luar negeri seperti ke Singapura, Hongkong, maupun Eropa ataupun AS, dan juga Jepang, tetapi cukup berbelanja di Jakarta ini. Karena produk-produk yang ditawarkan seperti pusat perbelanjaan Sogo Departemen Store, Pondok Indah Mall, Blok M Mall, dan sebagainya menawarkan produk-produk import yang menjadi "pretise" bagi kalangan atas yang bersifat eksklusif.

Untuk kalangan menengah dapat berbelanja di Matahari Departemen Store, Robinson Departemen Store dan lain-lain. Produk-produk yang ditawarkan cukup berkualitas, dan juga bergengsi.

Pusat-pusat perbelanjaan yang ada di DKI Jakarta ini selain sebagai pasar, juga sebagai arena rekreasi. Ruangan yang bertata rapi dan ber-AC, juga didukung oleh pelayan-pelayannya yang simpati. Sehingga banyak para pengunjung (konsumen) lebih senang berbelanja ke pusat perbelanjaan tersebut yang nyaman dan harga tidak begitu mahal dibanding pasar-pasar tradisional yang kurang tertata apik dan kadang-kadang kotor.

Bagi warga DKI Jakarta yang rata-rata pendapatannya adalah jauh diatas rata-rata nasional, yang menurut sebuah artikel di majalah *Swasembada*, Juli 1987, diperkirakan di Indonesia terdapat 75 ribu orang yang berpenghasilan tinggi sekali : sekitar 10% dari kelompok tersebut termasuk Kaum Sangat Kaya (KSK) yang sering berbelanja barang lux senilai 50 juta per sekali belanja; sebagian besar dari kelompok tersebut tinggal di Jakarta mendukung suasana bisnis eceran tersebut (Hidayat, 1987: 16)

Konsentrasi perdangan eceran dewasa ini, sangat berkaitan dengan izin usaha yang diberikan oleh Pemda DKI Jakarta. Namun dalam menentukan lokasi tidak dapat terjadi tidak sejalan dengan peruntukkan wilayah. Hal ini dapat terjadi karena adanya

perbedaan orientasi antara pengusaha dan pemerintah dalam menentukan lokasi (Agus Sumarno dan Sucherly, 1987: 41), dan kadangkala pula adanya kolusi antara pengusaha dan penguasa Pemda DKI Jakarta dalam memberikan izin untuk membuka pusat perbelanjaan yang modern yang berdampingan dengan pusat perbelanjaan (pasar) tradisional. Tindakan tersebut pada dasarnya sudah menyalahi ketentuan yang berlaku. Akibatnya konsumen yang biasanya berbelanja di pasar tradisional, akhirnya pergi berbelanja ke pusat perbelanjaan yang modern itu. Otomatis omzet penjualan di pasar tradisional menjadi menurun dan tidak mustahil pedagang-pedagang di pasar tradisional itu akan bangkrut dalam menghadapi persaingan.

4.2. Kondisi Kesejahteraan Karyawan

Adapun kondisi kesejahteraan karyawan bila pegawai pemerintah maupun pegawai swasta selalu berbeda menurut pangkat (Jabatan) dan masa kerja. Sedangkan upah seorang karyawan (pegawai) di sektor pedagang eceran (retail business) yang diterimanya sesuai dengan teknologi yang terkait dengan barang dagangannya. Makin tinggi nilai teknologinya, makin tinggi pula upah yang diterimanya (Agus Sumarno dan Sucherly, 1987: 32).

Di samping itu pula perbedaan kesejahteraan karyawan pabrik dengan karyawan di perkantoran tetap ada, dan juga perusahaan yang berinduk dari Eropa biasanya lebih mahal memberikan kesejahteraannya dibandingkan dari negara-negara Asia Timur (Jepang, Korea, Taiwan). Begitu pula kesejahteraan bekerja pada perusahaan swasta nasional. Hal ini disebabkan kurs mata uang asing (dollar, yen) lebih tinggi dari pada kurs mata uang Indonesia. Dengan demikian tingkat kesejahteraan karyawan, baik di sektor pemerintah maupun di sektor swasta sangat bervariasi.

Kesejahteraan pegawai negeri dibandingkan dengan kesejahteraan swasta jauh lebih baik kesejahteraan karyawan (pegawai) swasta. Karyawan swasta biasanya mendapatkan tunjangan kesehatan, cuti hamil, bonus dsb. Kesejahteraan tersebut diimbangi dengan kerja yang penuh (terus menerus). Ini biasanya terjadi di lingkungan perusahaan swasta yang besar di sektor perbankan, pengeboran minyak, industri berat, dsb.

Sedangkan karyawan swasta yang bekerja di lingkungan pabrik (industri) menengah ke bawah seperti di pabrik garmen, elektronik, makanan dan minuman dsb, kesejahteraannya kurang memadai.

Mengenai upah kalangan ahli ekonomi membahas sebab-sebab perbedaan upah. Sebab-sebab itu tidak saja karena sifat pekerjaan, tetapi juga karena kualitas pekerjaan dan harapan-harapan yang diletakkan terhadap pekerjaan (Adam Smith, 1960: 76-77).

Teori upah dari Ricardo menyatakan bahwa tingkat upah yang ditaksir melalui pangan dan kebutuhan pokok lainnya secara absolut adalah tetap. Demikian pula penelitian Malthus tentang tingkat upah dan jumlah penduduk di Inggris telah membawanya kesimpulan bahwa ada hubungan dengan antara kedua faktor tersebut (pangan dan kebutuhan pokok lainnya). Hal ini merupakan pula suatu model pertumbuhan mazhab

klasik (Alfred Marshall, 1959: 420-421).

Adapun teori upah yang dikemukakan oleh Dunlop adalah upah ditentukan (disetujui) antara serikat buruh dengan majikan (John T. Dunlop, 1957:12). Sedangkan Galbraith berpendapat bahwa serikat merupakan monopoli ataupun oligopoli yang merupakan konsentrasi kekuatan ekonomi modern (John K. Galbraith, 1957: 111-118).

Kenyataannya di Indonesia, serikat buruh impoten tidak banyak berperan dalam memperjuangkan anggota-anggotanya. Bahkan keberadaannya oleh pihak majikan (Pengusaha) hanya menurut ketentuan dari pemerintah, harus mempunyai wadah (organisasi) yang dapat memperjuangkan kepentingan karyawan (buruhnya). Nyatanya serikat kerja (buruh) tersebut apabila berhadapan dengan perusahaan, dalam menuntut kesejahteraannya tidak mempunyai kekuatan yang dapat merubah keadaan. Bahkan apabila terjadi pemogokan, para buruh berhadapan dengan aparat keamanan dalam menenangkan (memadamkan) para kum pemogok kerja (demonstran) ketimbang memberikan kenaikan upah yang dituntut para buruh.

Kesejahteraan buruh (karyawan) swasta tergantung kemauan politik pemerintah untuk menaikkan (menyesuaikan) kesejahteraan para pekerja tersebut. Ini dapat dilihat dari Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Menaker) RI Nomor Kep. 461/MEN/1993 tanggal 20 Desember 1993 tentang peningkatan upah minimum regional di DKI Jakarta, dari Rp. 3.000,- per hari menjadi Rp. 3.800,-. Sedangkan gaji perbulan Rp. 112.000,-

Didalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja RI tersebut juga memuat standart jam kerja. Bila jam kerjanya per hari sebanyak 7 jam. Sedangkan bila jam kerjanya perminggu hanya 5 hari kerja, maka jam kerjanya perhari sebanyak 8 jam. Jadi pekerja selama satu minggu jam kerja sebanyak 40 jam.

Strategi industri di Indonesia dalam menarik pemodal asing, pemerintah menawarkan kepada mereka tentang upah yang relatif murah sebagai salah satu daya tarik bagi para investor. keadaan yang demikian itulah salah satu yang cukup menyebabkan kondisi kesejahteraan para buruh yang cukup memperhatikan. Disamping adanya biaya tinggi bagi para investor dalam mengurus soal perizinan yang begitu birokratis, sehingga hal-hal semacam itu akhirnya yang memikul adalah para buruh sendiri.

Yang tidak kalah pentingnya dalam memperhatikan kondisi kesejahteraan karyawan (buruh) adalah memperhatikan kualitasnya khususnya pada segi Pendidikan. Menurut suatu penelitian pada tahun 1985, pekerja yang tidak sekolah 21, 71%, tidak/belum tamat SD 14,41% tamat SD 27,59%, tamat SMTP 7,05%, SMTA 7,97%, dan Akademi/Universitas 1,28% (Hanan Sigit, 1989:10). Oleh sebab itu Pemerintah Indonesia dalam rangka memasuki Pembangunan Jangka Panjang II ini sebagaimana yang diamanatkan oleh GBHN tahun 1993, akan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Salah satu upaya meningkatkan sumber daya manusia, pemerintah menggariskan kebijakan yaitu program wajib belajar 9 (sembilan) tahun. Artinya bahwa anak Indonesia diharapkan nantinya akan memasuki Pelita VI sekurang-kurangnya tamat Sekolah menengah Pertama. Program wajib belajar 9 tahun ini mulai dicanangkan oleh presiden

Soeharto pada tahun 1993.

Sumber daya manusia yang berkualitas ternyata dapat meningkatkan kesejahteraan buruh. Ini dapat dilihat dari kenyataan empiris bahwa para tenaga kerja (buruh), yang bermutu biasanya mendapat pekerjaan yang berkualitas, "dibajak" oleh perusahaan lainnya, seperti para tenaga bankir ditransfer dari satu bank ke bank lainnya. Dengan demikian sumber daya manusianya mempunyai produktifitas yang tertinggi, dengan sendirinya kesejahteraannya menyertainya.

Adapun kondisi kesejahteraan pegawai negeri, pada umumnya pas-pasan. Mengingat anggaran negara (APBN) yang merutakan sumbernya, tidak/belum memungkinkan untuk hidup lebih sejahtera, bahkan untuk menutupi kekurangannya, biasanya ada sebagian pegawai negeri itu mencari pekerjaan lainnya atau disebut "ngobyek".

Bagi pegawai negeri yang berstatus sebagai guru, biasanya mereka itu mengajar bukan satu sekolah saja, akan tetapi lebih dari satu sekolah.

Bagi pegawai negeri yang ekonominya berstatus makmur, biasanya mempunyai proyek pembangunan dari anggaran negara. Disamping itu pula mempunyai jabatan rangkap, karena orang yang mempunyai jabatan, mendapat tunjangan jabatan, baik struktural maupun fungsional.

Oleh karena tidak cukupnya penghasilan yang diterima pegawai negeri, menimbulkan adanya "komersialisasi jabatan". Komersialisasi jabatan ini disebabkan oleh meningkatkan pemupukan dana serta alokasi penggunaan untuk menunjang dan bersamaan dengan pembangunan. Kecuali itu juga berhubungan dengan pelaksanaan wewenang pengaturan pemerintah, misalnya dalam bidang perizinan, penetapan tarif, penetapan jatah-jatah dan kuota-kuota serta keperluan berbagai macam pencatatan-pencatatan (Bintaro Tjokroamidjoyo, 1976:39). titik hubungan antara pemerintah dan masyarakat yang meluas di bidang itu, merupakan potensi transaksi kegiatan yang bisa bersifat koruptif. Dan hal diatas memang akan diperparah apabila sulit dibedakan antar penguasa dan pengusaha. Bukan rahasia lagi betapa banyak anak pejabat menjadi pengusaha yang mendapatkan fasilitas-fasilitas tertentu.

Keadaan yang demikian itu biasanya terletak pada bidang-bidang pelayanan masyarakat secara langsung. Ini dapat dilihat dari tingkat terbawah aparatur pemerintah di kantor-kantor Kelurahan, dimana biaya administrasi mengurus seperti KTP dan sebagainya melebihi dari tarif yang ditetapkan pemerintah.

Di lain pihak adanya oknum masyarakat yang ingin cepat urusannya, dan biasanya dipermudah/dipercepat urusannya tersebut. Disini oknum masyarakat tersebut mengambil jalan pintas melalui kerja sama oknum aparat.

Melihat keadaan yang demikian, tidak begitu saja dapat disalahkan oknum aparat, tanpa adanya kerja sama dari oknum masyarakat yang memberi iming-iming berupa "upeti" atau "hadiah". Nampaknya bahwa kondisi ekonomi pegawai pemerintah itulah yang dapat menggoda untuk berbuat penyelewengan, disamping kurang tebalnya norma-norma agama (iman), sumpah sapta prastya Korpri dan sebagainya. Sehingga timbullah

apa yang dinamakan korupsi. Pemerintah berusaha menertibkan pegawai melalui Undang-undang No. 8/1974 (UU Pokok Pegawai) yang dijabarkan lagi dengan tiga peraturan Pemerintah yaitu PP No.15/1979, PP No.3/1980, dan PP No.30/1980.

Bahkan pada masa kini untuk pengadaan bagi masyarakat yang dirugikan oleh aparaturnegara dapat mengirim surat ke wakil Presiden Kotak Pos 5000; ataupun dapat menggugat pengadilan Tata Usaha Negara. Biasanya surat-surat pengaduan tersebut yang indikasinya mendekati kebenaran, akan diteruskan pada instansi yang membawahi aparat yang berbuat tindak kecurangan/penyelewengan. Jika nantinya terbukti bahwa pengaduannya tersebut ternyata benar, aparat tersebut dapat ditindak sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Memang telah ditegaskan dalam sumpah sapta prastya korpri yang salah satunya memuat bahwa anggota korpri adalah abdi negara dan abdi masyarakat. Ditambah lagi Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) khususnya didalam lampiran riwayat ditegaskan bahwa bila seorang menjadi pegawai negeri tidak boleh meminta fasilitas, dan bersedia ditempatkan dimana saja. Ini diartikan bahwa seorang yang menjadi pegawai negeri harus siap berkorban; yakni bila tidak mencukupi kebutuhannya, itu sudah menjadi resikonya.

Akan tetapi ada sebagian oknum pegawai negeri yang terlupakan atau sengaja melupakan sumpahnya ataupun sewaktu mereka itu mengisi biodata menjadi pegawai negeri. Hal ini memang merupakan sifat manusiawi. Artinya bahwa pegawai negeri itu merupakan manusia yang senang kepada hal-hal kemewahan, kecukupan dan lain-lain seperti halnya manusia-manusia secara umum. Bila adanya penyimpangan didalam tugas bukan berarti tindakan tersebut dibenarkan oleh Undang-Undang, atau atasannya; merupakan menjadi tanggung jawab pribadi-pribadi pegawai tersebut, karena bagaimanapun juga masalah rejeki sudah diatur oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Artinya, kalau seorang pegawai negeri yang jujur dan bertindak benar, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar dari segala kesulitan. Bagaimanapun juga bila seseorang berbuat jujur dan benar, pasti teman sejawatnya akan senang kepadanya, dan biasanya temannya tersebar bila mendapat tambahan rejeki sedikit-tidaknnya teman tersebut akan memberikan persen.

Bila seorang pegawai negeri membuat kecurangan, pada akhirnya akan menerima ganjaran. Ini dapat dilihat pada kasus korupsi di Bank Bapindo pada tahun 1994 yang merupakan peristiwa "nasional". Orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut akhirnya diajukan ke muka pengadilan, dengan tuduhan berkolusi dengan seorang pengusaha dari kelompok non-pribumi. Uang negara yang dikeluarkan untuk kredit yang akhirnya memacet itu sebesar Rp. 1,3 trilyun. Itu baru satu pengusaha yang berkolusi dengan penguasa. Karena menurut sinyalemen Menteri Keuangan RI, masih ada sekitar 50 pengusaha lagi yang berindikasi memacetkan kredit itu tidak dapat diatasi dengan segera, niscaya kredit dari luar negeri dikhawatirkan akan meragukan kemampuan ekonomi Indonesia dalam mengurusnya.

Lolosnya kredit bank yang diberikan kepada pengusaha yang jumlahnya ratusan milyar bahkan trilyun-an tersebut, tidak mustahil adanya kolusi antara pegawai bank

dengan pihak pengusaha sendiri. Karena sudah menjadi rahasia umum, baik seorang meminjam uang dari suatu bank, pasti orang dalam sendiri akan menerima komisi dari peminjam tersebut.

Oleh sebab itu tidak mengherankan bila pegawai bank hidupnya lebih makmur dibanding pegawai lainnya, disamping gajinya sudah besar, sering kali mereka mendapat komisi dari peminjam itu. Dan tak kalah pentingnya adalah tanggung jawab dan pekerjaannya besar pula. Itu berarti upah yang besar sebanding dengan tanggung jawab yang besar (berat) pula.

Secara umum kondisi kesejahteraan pegawai negeri sangat memprihatinkan. Dilihat dari struktur gajinya sendiri berdasarkan peraturan gaji terakhir yaitu peraturan pemerintah Nomor 15 tahun 1993 tercatat bahwa gaji tertinggi yaitu golongan IVE dengan masa kerja 32 tahun sebesar 537.600,-, itu merupakan gaji seorang pegawai negeri yang paling tinggi (besar), khususnya eselon I. Disamping itu ditambah tunjangan istri 10%, anak 2%. Bila dijumlah secara keseluruhannya tidak mencapai Rp. 5.000.000,-.

Sedangkan pegawai negeri golongan yang lebih rendah lagi, dapat dibayangkan, berapa yang mereka terima tiap bulannya bila dikurangi dengan pengeluaran pada tiap bulannya.

Oleh sebab itu akibatnya kurang upah (gaji) mereka, sementara gejala konsumerisme di sekelilingnya terus menggoda, maka tidak mustahil ada sebagian oknum pegawai yang bertindak tidak jujur. Sebagaimana yang diucapkan sewaktu apel 17-an ataupun hari-hari besar sewaktu Sumpah Sapta Prastya Korpri, maupun sewaktu mereka itu mengisi daftar riwayat hidup yang dicantumkan Surat Edaran dari BAKN yang memuat tidak meminta fasilitas negara, ternyata masih ada yang melanggarnya.

Oleh sebab itu jangan heran, bila didalam tugasnya melayani masyarakat, sering ditemui pelayanan yang kurang lancar, atau berbelit-belit. Biasanya bila seorang yang ingin lancar urusannya, memberikan "uang pelicin" kepada oknum pegutas. Meskipun demikian tidak semua pegawai negeri berbuat demikian. Sebab bagaimanapun juga masih banyak pegawai yang berdisiplin tinggi, melayani masyarakat dengan baik dan tidak berbelit-belit. Itu semua tergantung kepada pribadi masing-masing yang dibina dari lingkungan keluarga, khususnya ajaran-ajaran agama yang membentuk pribadinya.

BAB V

PENUTUP

Sebelum kami mengakhiri pembahasan etos kerja kaitannya dengan nilai budaya, yang perlu dipertanyakan adalah apakah betul bahwa etos kerja itu berkaitan erat dengan nilai budaya. Hal tersebut diragukan oleh kalangan penganut teori Dependensi seperti Andre Gunder Frank, Raul Prebisch, Cardoso, Sritua Arief dan Adi Sasono dan lain-lain. Sedangkan kalangan penganut teori modernisasi mendukung pendapat tentang etos kerja berkaitan dengan nilai budaya seperti Max Weber, Robert Bellah, Mac Clelland, Koentjaraningrat dan lain-lain.

Menurut kalangan penganut teori Dependensi bahwa keterbelakangan negara-negara berkembang bukan disebabkan oleh mentalitas atau sistem nilai-nilai budaya yang masih tradisional. Justru keterbelakangan disebabkan oleh adanya imperialisme ekonomi negara-negara maju yang sudah berhasil menciptakan suatu struktur ekonomi dependensi melihat masalah pembangunan bukan masalah dalam negara-negara berkembang itu sendiri secara terpisah-pisah, melainkan sebagai suatu masalah internasional dimana kepentingan banyak negara saling bersangkutan. Negara maju menguasai sistem perekonomian dunia, karena itu kepentingan-kepentingan negara-negara maju lebih terlayani atas kerugian negara-negara berkembang (Arief Budiman, 1984: XIII-XIV).

Ada orang yang berpendapat bahwa kemajuan suatu kelompok masyarakat bukan ditentukan oleh nilai budaya yang membentuk etos kerjanya; justru lingkungan yang merupakan ancaman paksaan dan bahaya terus-menerus itu membuat kelompok masyarakat itu jauh lebih berkemampuan dalam mengatasi segala hal. Sehingga etos kerja seperti yang dipunyai para perantau segala hal. Sehingga etos kerja seperti yang dipunyai para perantau secara umum lebih maju dari pada penduduk aslinya (Kaptin Adisumarta, 1981:10).

Namun tidak semua perantau berhasil. Banyak juga yang gagal, hancur. Bahkan gagal lebih banyak dari pada yang berhasil. Ini dapat dilihat dari daerah-daerah pemukiman kumuh, Pencopet (penjahat) sering beraksi di kota Jakarta. Bahkan sebagian besar pelacur berasal dari penduduk pendatang, begitu juga pengemis dan gelandangan.

Begitu pula halnya masyarakat Betawi yang merupakan tuan rumah penduduk Jakarta, dalam stereotipnya digambarkan masyarakat yang terbelakang, pasif dan sebagainya. Stereotip yang demikian tidak semuanya benar. Ini dapat dibuktikan secara empiris bahwa pada masa kini masyarakat Betawi sudah lebih maju dibanding dengan generasi tuanya. Bahkan pada masa lalu mereka dikenal bila terdesak ekonominya, tanahnya yang dijual dan selanjutnya uang hasil penjualan tersebut digunakan untuk keperluan kehidupan, seperti untuk biaya perkawinan, naik haji, bahkan untuk kawin lagi.

Akibat terdesaknya oleh arus modernisasi (pembangunan) sehingga masyarakat Betawi banyak yang tergusur, menyebabkan orientasi berpikir dan bertindak sudah tidak lagi mengikuti generasi tuanya. Lingkungan yang mengancam maupun paksaan jaman, menyebabkan generasi muda masyarakat Betawi mau tidak mau tidak lagi

mengandalkan tanah warisan orang tuanya. Karena tanahnya sudah habis terjual, menyebabkan mereka harus bekerja keras atau bersekolah umumnya seperti pendatang lainnya. Tentunya dengan mengandalkan keahlian dan ijasah, mereka akhirnya banyak yang bekerja di sektor pemerintah maupun swasta. Bila tidak menjadi karyawan, biasanya menjadi supir omprengan (Kendaraan umum), penarik ojek, broker (calo), pedagang dan sebagainya. Ini artinya bila tidak terjun ke sektor formal, mereka itu bergerak di bidang sektor informal.

5.1. Kesimpulan

Masyarakat Jakarta yang multi etnik, generasi keduanya tidak sekeras generasi pertama (kaum perantau). Inipun dapat juga dilihat masyarakat Cinanya bahwa yang lebih maju adalah masyarakat Cina yang berasal dari luar Jakarta, seperti Cina dari Medan, Pontianak, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Lingkungan kampung halaman sendiri, baik non-pribumi (Cina-Arab) maupun keturunan perantau, ternyata juga tetap kurang subur untuk perkembangan pribadi dan usaha anak-anak mereka.

Dalam lingkungan yang lebih besar, proses industrialisasi yang merupakan penerapan dari modernisasi, ternyata tidak dapat diharapkan sepenuhnya. Karena sistem produksinya bersifat padat modal tersebut menyebabkan banyak pengangguran dan bersifat monopoli dan oligopoli. Dengan sistem ini pengusaha informal akan mati, kinerja menjadi rendah dan etos kerja punah. Kinerja akan tumbuh berkembang apabila diadakan kompetisi maka akan lahir kemajuan dan penampilan kerja (performance) yang meningkat studi yang dilakukan Norman Triplett tahun 1987 menunjukkan hubungan antara kinerja individual dengan kompetisi sangat berpengaruh. Oleh sebab itu penilaian yang objektif kepada setiap individu perlu dijadikan dasar dalam pemberian gaji dan pengembangan karir. Hal yang sama juga terjadi dalam persaingan antar pengusaha, fabrikasi, kantor dinas dan sebagainya. Dalam persaingan itu akan timbul kinerja yang ulet dan etos kerja yang tinggi.

Dalam industri persaingan itu akan menghasilkan produk yang bermutu tinggi dan berharga murah. Dalam perusahaan akan timbul efisiensi. Dalam pendidikan akan lahir sumber daya manusia yang unggul.

Secara umum kita telah merasakan hasil-hasil pembangunan. Akan tetapi kalau kita berfikir objektif apa yang telah kita capai masih jauh tertinggal dari apa yang dicapai negara-negara berkembang lainnya seperti Malaysia, Thailand dan Taiwan. Mereka telah dapat menerobos pasar internasional sedangkan kita masih bergelut dengan pemenuhan kebutuhan dalam negeri. pemerintah berupaya mengadakan deregulasi ke deregulasi namun belum mampu mengadakan deregulasi yang integral untuk mengembangkan kompetisi yang sehat dalam masyarakat.

Di lingkungan pegawai negeri, etos kerjanya yang mengacu kepada produktivitas umumnya masih rendah. Hanya sebagian Departemen seperti Departemen Keuangan dan

ajarannya nampak produktivitasnya lebih tinggi dibandingkan Departemen Departemen lainnya. karena mereka itu selain menerima gaji setiap bulan, mendapat insentif (perangsang) yang lebih besar dari gaji bulannya. Konsekuensinya bila tidak masuk kerja tanpa ada pemberitahuan (ijin), insentifnya tersebut dipotong. Dengan demikian disiplin kerjanya agak tinggi.

Etos kerja karyawan swasta cukup tinggi apalagi karyawan swasta perusahaan asing. hal ini disebabkan sistem kerjanya bagaikan mata rantai khususnya di sektor produksi (seperti pabrik) dan juga adanya bonus dari perusahaan. Dan yang terpenting kedisiplinannya cukup ketat. Sebab bila seorang karyawan malas bekerja dapat diberhentikan (Pemutusan Hubungan Kerja = PHK).

Jadi secara umum etos kerja itu dapat lebih meningkat bila didukung oleh adanya insentif (bonus) uang diikuti oleh disiplin kerja yang tinggi disamping adanya tantangan atau ancaman yang memaksa masyarakat tersebut untuk mengatasinya dengan adanya tantangan atau ancaman yang memaksa masyarakat tersebut (seperti para perantau, golongan minoritas) untuk mengatasinya, dengan sendirinya etos kerja yang tinggi, mereka akan terlempar dari arena pertarungan kehidupan.

5.2 Saran

Untuk meningkatkan etos kerja dalam masyarakat DKI Jakarta khususnya perlu diupayakan antara lain :

- a. Upaya penerapan disiplin oleh pemerintah dibarengi dengan kesejahteraan yang layak secara konsekuen dan konsisten khususnya kepada karyawan pegawai negeri yang merupakan abdi negara dan abdi masyarakat. Dengan adanya upaya tersebut diharapkan disiplin para birokrat lebih mantap dalam melayani masyarakat tidak berbelit-belit. Disamping itu budaya masyarakat bahwa Indonesia secara umum adalah budaya anutan, artinya bahwa para tinggi negara bersifat jujur, patuh kepada peraturan, otomatis masyarakat akan mengikutinya.

Penerapan disiplin akan berhasil apabila pelaksanaannya konsekuen terhadap semua jenjang kepegawaian dan konsisten kontinyu pengawasannya jangan sampai ada pemero hangat-hangat tai ayam dan diskriminasi, yaitu hanya ditujukan bagi pegawai rendah saja.

Pengertian disiplin bukan hanya jam kerja, tetapi semestinya harus mencakup seluruh aspek hidup seperti disiplin terhadap waktu, terhadap tugas, terhadap peraturan, terhadap etika, terhadap agama, terhadap moral, terhadap pelayanan, terhadap diri sendiri dan kejujuran pribadi jadi disiplin itu harus lahir dalam kesadaran pribadi menjadi budaya pribadi yang pada akhirnya menjadi budaya nasional. Dengan demikian budaya disiplin hidup dikalangan pegawai, militer, kaum buruh, petani, pengusaha dan seluruh rakyat Indonesia.

- b. Pengaruh globalisasi memerlukan etos kerja yang tinggi. Globalisasi akan masuk dalam semua aspek kehidupan bangsa. Dengan etos kerja yang tinggi kita dapat

bersaing dengan negara lain karena produksi kita berkualitas tinggi dengan harga bersaing.

Tanpa etos kerja kita menjadi bangsa yang konsumtif yang menjadi bahan mainan bagi negara-negara produsen. Kita harus unggul dalam industri oleh sebab itu kita harus memiliki etos kerja yang tinggi seperti Jepang, Korea dan Taiwan. Untuk lebih meningkatkan industrialisasi, hendaknya para pejabat negara maupun kelas menengah secara konsekuen dan konsisten harus menggunakan produk-produk dalam negeri. Sebab dengan menggunakan produk-produk dalam negeri, industri dalam negeri produksinya akan semakin meningkat sambil memperbaiki kualitasnya agar supaya dapat bersaing dengan produk-produk luar negeri. Dengan adanya kemajuan industrialisasi tersebut, kesejahteraan para karyawan swasta semakin meningkat dan secara langsung meningkatkan etos kerja. Hal tersebut diterapkan di negara berkembang yang berhasil dalam menuju negara industri baru; seperti yang ingin dilakukan oleh negara Indonesia. Disekolah-sekolah hendaknya diberikan latihan praktek dalam menerapkan pengetahuannya. Karena secara umum perusahaan-perusahaan dalam mencari karyawan baru mensyaratkan adanya pengalaman kerja. Dengan adanya praktek lapangan, tentunya bekerja sama dengan Depnaker, BUMN, Perusahaan swasta, dan lain-lain, diharapkan akan menumbuhkan manusia yang terampil dalam mengisi pembangunan ini.

- c. Dalam bidang pertanian perlu diupayakan pemanfaatan lahan pertanian yang baru bagi pembukaan lapangan kerja baru yang dapat menampung jutaan jiwa. Dengan meningkatkan produksi pertanian dan penghasilan yang memadai maka urbanisasi menuju kota-kota besar, Jakarta khususnya akan berkurang malahan akan terjadi sebaliknya orang kota akan kembali ke desa untuk bertani. Maka masyarakat Ciracas, Jakarta akan berkurang pula sesuai dengan daya dukung lahan yang ada. Etos kerja akan meningkat pula produk mereka dapat memberi kesejahteraan yang memadai. Semakin tinggi hasil produk petani semakin tinggi pula etos kerja petani. Masyarakat Ciracas dengan budaya yang amat rajin gotong royong, ulet yang telah teruji dengan persaingan keras dalam kehidupan ekonomi pantas menjadi pelopor dalam etos kerja baik dalam bidang industri, pertanian, perdagangan pengusaha dan karyawan swasta-negeri.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Abdullah Taufik (ed), 1982, *Agama, etos kerja dan perkembangan ekonomi*, Jakarta LP3ES.
2. Adi Sumarta Kaptin, 1981. Masalah pengusaha pribumi, "prisma" Jakarta LP3ES.
3. Arief Sritua dan Adi Sasono. 1981 : *Indonesia : Ketergantungan dan Keterbelakangan*, Jakarta ; Lembaga Studi Pembangunan.
4. Anwar Ibrahim Moh. 1976. Pertumbuhan Industri Indonesia : Tinjauan Sektoral. "Prisma 12", Jakarta LP3ES.
5. Bellah Robert N, 1992, *Relegi Tokugawa : Akar-akar budaya Jepang*. Warbah Hafidz dan Drs. Wilah Budi Hardjo. Jakarta : Gramedia.
6. Boath Anne, 1989, "Repelita V Strategi Perekonomian Jangka Menengah Indonesia", Prisma 8, Jakarta : LP3.ES.
7. Budiman Arief, 1984. "Andre Gunder Frenk dan teori Dependensi : sebuah Pengantar, dalam andere Gunder Frank, Sosiologi Pembangunan : dan Keterbelakangan sosiologi, jakarta : pustaka pulsar.
8. Castles Lance, 1983. "birokrasi dan Masyarakat Indonesia", *Dalam Birokrasi, kepemimpinan dan Revolusi Sosial*, Surakarta : Hapsara.
9. Dieter Evers Han, 1991. "Ekonomi bayangan produksi subsisten dan Sektor informal : kegiatan ekonomi di luar Jangkauan pasar dan negara". prisma Jakarta : LP3.ES.
10. Dunlop John T, 1957. *The theory of wages Determinatio*, London Macmillan.
11. Galbriath John K, 1957. *American Capitalism : the Concept of Counter Vailing Power*, London : Hanish Hamilton.
12. Geertz Clifford, 1977 : *Penjaja dan raja*, Jakarta : Gramedia
13. Hidayat, 1977. "Penjaja dan profil serta prospek Perdagangan Eceran", *Prisma 7*, Jakarta : LP3.ES.
14. Karo Hiroyoshi, 1984. "sistem pemilikan tanah dan masyarakat desa di Jawa pada abad XIX", dalam *dua abad penguasaan tanah*, Sediono MP. Tjondodronegoro, Gunawan Wiradi (ed).
15. Koentjaraningrat, 1984. *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*, Jakarta : Gramedia.
16. Koentjaraningrat, 1986. *Pengantar Ilmu antropologi*, Jakarta : Aksara Baru.
17. Laeyendecker. L. 1983. *Tata, Perubahan, dan Ketimpangan : Suatu Pengantar Sejarah Sosiologi*, Jakarta, : Gramedia.
18. Marshall Alfred, 1959. *Priinciples of Economic*, : Mac millan.
19. Mangun Wijaya (ed), 1985. *Teknologi dan Dampak Kebunya*, val II Jakarta : Midas surya Grafindo.

20. Muhaimin Cahya, 1980. Beberapa segi birokrasi di Indonesia, *prisma* 10. Jakarta : LP3.ES.
21. Nil Robert Van, 1984. *Munculnya elit Modern Indonesia*, Jakarta : Widjaya.
22. Osman A. Latif, 1975. *Ringkasan sejarah Islam II*, Jakarta : Widjaya.
23. Onghokham, 1984. "Perubahan Sosial Modern selama abad XIX. pajak dan pengaruhnya terhadap penguasaan tanah", Sediona M.P. Tjondronegoro. Gunawan Wiradi (ed). *Dua abad penguasaan Tanah*. Jakarta : Gramedia.
24. Onghokham, 1984. "Bentuk negara di Indonesia". *prisma* 8. Jakarta : LP 3 ES
25. Pringgodigdo AK, 1983. *Sejarah pergerakan Rakyat Indonesia*. Jakarta : Dian Rakyat.
26. Rahardjo M. Dewam, 1983. Esai-esai ekonomi politik, Jakarta LP 3 ES.
27. Rahardjo M. *Kapitalis dulu dan sekarang*. Jakarta : LP 3 ES
28. Rachbini Didik J, 1991. "Ekonomi politik pada sektor informal", *prisma 5 Jakarta* : LP 3 ES.
29. Robinson Richard, 1984. *Sejarah Politik Orde Baru*, Jakarta : Lembaga Studi Pembangunan (LSP).
30. Rax Borough Ian, 1986. *Teori-teori Keterbelakangan*, pentj. Rachman Achwan, Jakarta : LP 3 ES.
31. Sanusi Bunatran, 1981. "Pelembagaan serikat buruh dan masalahnya catatan kasus perburuan di Indonesia/1973-1981", *prisma* 5, Jakarta : LP 3 ES.
32. Sasono Adi, 1982. "Indonesia dari Ekonomi Terpimpin ke Kapitalisme Terpimpin", *prisma* 1, Jakarta : LP 3 ES.
33. Schriehe BJO, 1974, *Penguasa-penguasa pribumi*, Jakarta : Bharatara.
34. School JW, Prof. Dr, 1981. *Modernisasi pengantar sosiologi pembangunan negara-negara sedang berkembang*, Jakarta : Gramedia.
35. Sigit Sondang P, 1989 : "Transformasi Tenaga Kerja di Indonesia selama pelita", *prisma* 10, Jakarta : LP 3 ES.
36. Subeno Nur Imam, 1987 : "Kisah sukses 4 negara kecil dan Teori pembangunan" *prisma* 8, Jakarta. LP 3 ES.
37. Sumarno Agus, dan Sueherly, 1987 : "Struktur retail busines", *prisma* 7. Jakarta : LP 3 ES.
38. Smith Adam, 1960. *the Wealth of Nation*, Vol. 1, London : J.M. Dent dan Sons.
39. Susanto. R. 1980. *Hukum Pertanahan (Agraria)*. Jakarta: LP 3 ES.
40. Suryo Djoko. 1986. "Sektor Swasta dalam perspektif sejarah". *prisma* 10. Jakarta : LP 3 ES.

41. Tjiptoharijanto priyono, 1989. "Masalah korupsi perlu di dekati secara komprehensif", *prisma* 10, Jakarta : LP E ES.
42. Tjiptoharijanto priyono, 1989. "Sektor informal perkotaan dan masalah lapangan kerja", *prisma* 5, Jakarta : LP 3 ES.
43. Widiyanto Paulus, 1991, "Kuam pinggiran", *prisma* 5, Jakarta : LP 3 ES.
44. Wirahadikusumah Miftah, 1991. "Sektor informal pada masyarakat kapitalis". *prisma* 5. Jakarta : LP 3 ES
45. Wahyudi, J.B, 1992. *Teknologi informal dan produksi citra bergerak*, Jakarta : LP 3 ES.
46. Wasselink WHA, KYFF, 1959. Sejarah ekonomi. Djakarta : Hardhoff-koff.
47. Weiner Myran,t,t. Myran, t,t, *Moderenisasi : Dinamika Pertumbuhan*, voice of America Lectures.
48. Wirosardjono Soetipto, 1976, "Masalah Tenaga Kerja di sektor informal", *prisma* 9, Jakarta : LP 3 ES.
49. Zain Winarno, 1986. "pokok-pokok masalah dan pemikiran mengenai Industrialisasi", *Prisma* 1, Jakarta : LP 3 ES

DAFTAR RESPONDEN

1. Nama : Dobleh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 002/05 Ciracas

2. Nama : Misin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 004/05 Ciracas

3. Nama : Zaini
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 007/06 Ciracas

4. Nama : Ayi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Buruh Swasta
Alamat : Rt. 004/07 Ciracas

5. Nama : Rudi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 004/05 Ciracas

6. Nama : Naman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 004/05 Ciracas

7. Nama : Niih
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Rt. 001/05 Ciracas
8. Nama : Sarmilih
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMTP
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Rt. 003/06 Ciracas
9. Nama : Sabeni
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Rt. 007/04 Ciracas
10. Nama : Boang
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Rt. 003/04 Ciracas
11. Nama : Subur
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SMP
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Rt. 003/04 Ciracas
12. Nama : Sastra
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Agama : Islam
 Pendidikan : SD
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Alamat : Rt. 004/01 Ciracas

13. Nama : Thamrin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 002/04 Ciracas
14. Nama : Tugiman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 002/08 Ciracas
15. Nama : Sabar
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : Rt. 003/05 Ciracas
16. Nama : Waridin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Raya Ciracas No.1
17. Nama : Andi Alfi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Ciracas
18. Nama : Saifudin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Tukang las
Alamat : Rt. 002/05 Ciracas

19. Nama : Yatna Sumarna
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMTP
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Pertigaan Centex Rt. 002/05 Ciracas

20. Nama : Ali Rahman
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Rt. 007/02 Ciracas

21. Nama : Agus Sulistyio
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : STM
Pekerjaan : Supir
Alamat : Rt. 003/05 Ciracas

22. Nama : Supriadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Penganten Ali Ciracas

23. Nama : Gunawan
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Sultan Agung 33 Setia Budi

24. Nama : Muhamad Soleh
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Jl. Menteng Atas Selatan I No. 24
25. Nama : Tri Wiyatun
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Operator Telepon
Alamat : Jl. Kali Baru Timur No. 5 Galur Jakarta Pusat
26. Nama : Sobikun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Karyawan
Alamat : Kebun Pala Rt.02/02 Makasar Jakarta Timur
27. Nama : Jaya Saputra, SH
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Protestan
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Pengacara
Alamat : Jl. Pasar Minggu No. 9 Jakarta Selatan
28. Nama : S. Efendi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jl. Komp. POLRI Dalam No. 4

29. Nama : Sunaryo
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Muda
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Cipayung Jl. Mabes ABRI No. 14

30. Nama : Leo Suprayoto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Katolik
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Depok Timur Jl. Musi No. 61

31. Nama : Drs. I Wayan Djineng
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Tanjung Barat Rt. 004/03 No. 40

32. Nama : Dwi Suciningsih
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Diploma III
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Komp. TNI AD Cimanggis

33. Nama : Jainudin
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Cipinang Elok Blok Y No. 2

34. Nama : Siti Maryam
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Jl. Centex Rt. 0012/02 No. 45

35. Nama : Heryanti
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Jl. Raya Ciracas
Pasar Rebo

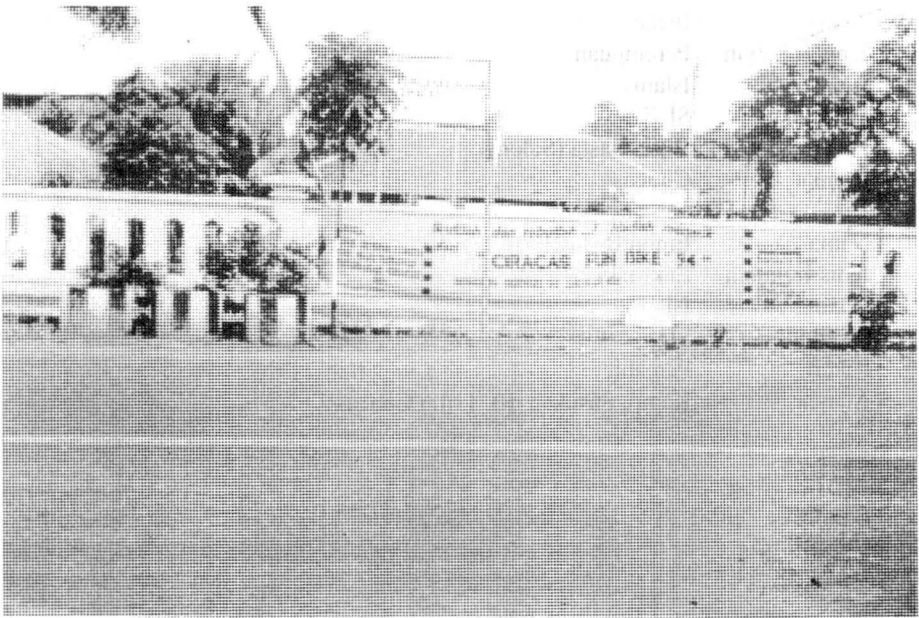
36. Nama : I Made Karmadi
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Hindu
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru (PNS)
Alamat : Jl. Raya Ciracas Jakarta Timur

37. Nama : M. Heliyanto
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana
Pekerjaan : Guru
Alamat : Kramat Jati
Rt. 012/06

38. Nama : Sibron
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : Sarjana Ekonomi
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jl. Sahid No. 54

39. Nama : Ineke
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pendidikan : SLTA
Pekerjaan : Wiraswasta (Salon)
Alamat : Ciracas

40. Nama : Emon B
Jenis Kelamin : Laki-laki
Agama : Islam
Pendidikan : SD
Pekerjaan : Penjahit
Alamat : Kamp. Susukan Rt. 11/06 Ciracas



Gambar 1

Gedung Kelurahan Ciracas Letaknya di pinggir Jl. Raya Ciracas



Gambar 2

Pertigaan Jl. Raya Bogor menuju ke wilayah Kelurahan Ciracas



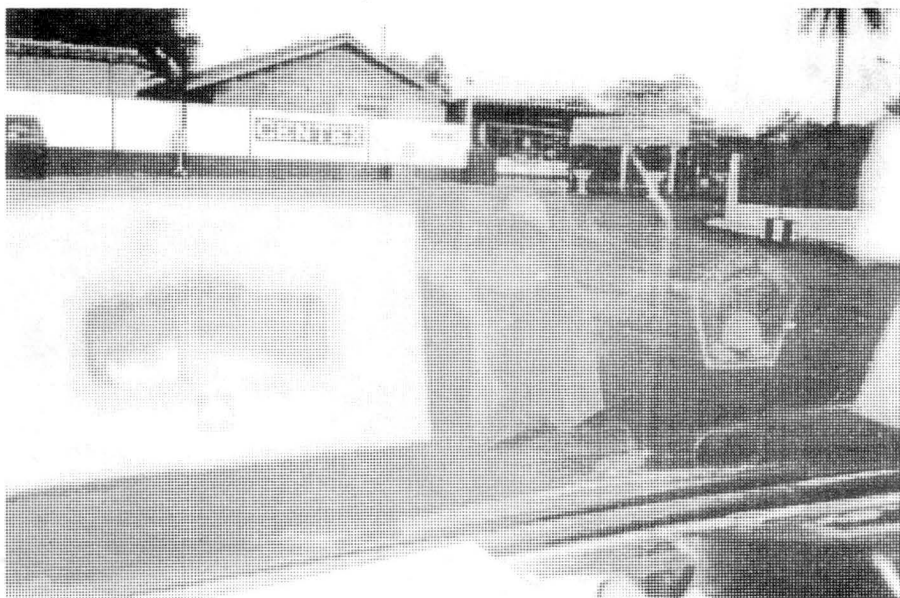
Gambar 3

Nampak kendaraan umum dan ojek sebagai alat transportasi di Wilayah kelurahan Ciracas



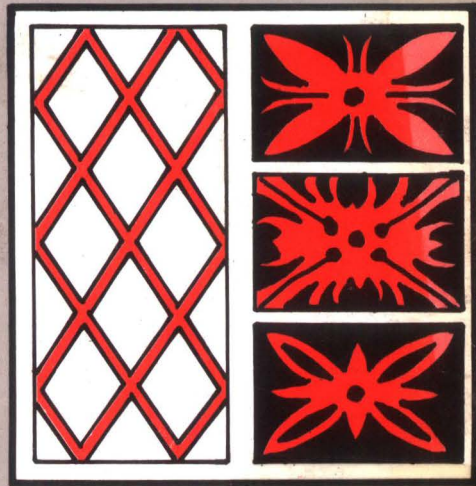
Gambar 4

Salah satu pabrik mie (PT. Sarimi) yang terletak di Jl. Raya Bogor dan termasuk masih di wilayah Kelurahan Ciracas.



Gambar 5

Nampak bangunan pabrik tekstil PT. Centex yang merupakan salah satu penghasil devisa masih berada di kawasan Kelurahan Ciracas.



Perpustakaan
Jenderal

305